

**IMPLEMENTASI PERDA KOTA BANDAR LAMPUNG NOMOR 10 TAHUN  
2011 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH  
TAHUN 2011-2030 PERSPEKTIF HUKUM ISLAM  
(Studi di Kelurahan Gedong Meneng Kec. Rajabasa)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat  
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
dalam Ilmu Syariah**

**Oleh:**

**DEDE WARDANA  
NPM: 1421020061**

**Jurusan : Siyasah Syar'iyah**



**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
1440 H/2019M**

**IMPLEMENTASI PERDA KOTA BANDAR LAMPUNG NOMOR 10 TAHUN  
2011 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH TAHUN 2011-2030  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi di Kelurahan Gedong Meneng Kec.  
Rajabasa)**

**Skripsi  
Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Tugas dan Memenuhi Syarat-syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
dalam Ilmu Syari'ah**

**Oleh:**

**DEDE WARDANA**

**NPM. 1421020061**

**Program Studi : Siyasah Syar'iyah (Hukum Tata Negara)**

**Pembimbing I : Dr. Hj. Erina Fane, S.H, M.Hum  
Pembimbing II : Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H.**

**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
1440 H/2019 M**

## ABSTRAK

Di Kelurahan Gedong Meneng telah terjadi permasalahan yaitu: alih fungsi lahan yang tidak sesuai dan mengakibatkan banjir. Padahal pemerintah kota telah menentukan kebijakan Perda Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2011-2030. Namun yang terjadi di lapangan tidak sesuai dengan rencana tata ruang kota. Lingkungan yang rusak akibat alih fungsi lahan yang tidak sesuai berdampak juga pada daerah lain. Islam mempunyai prinsip dalam hal penataan kota, contoh Rasulullah SAW telah mengajarkan umat manusia haruslah menata tempat tinggalnya dan memprioritaskan kesejahteraan lingkungannya dalam rangka kemaslahatan esok dan generasi mendatang manusia itu sendiri. Rumusan masalah yang akan di analisis: 1. Bagaimana implementasi perda kota Bandar Lampung nomor 10 tahun 2011 tentang rencana tata ruang wilayah tahun 2011-2030 di Kelurahan Gedong Meneng Kecamatan Rajabasa? 2. Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap implementasi perda kota Bandar Lampung nomor 10 tahun 2011 tentang rencana tata ruang wilayah tahun 2011-2030 di Kelurahan Gedong Meneng Kecamatan Rajabasa?

Adapun tujuan penelitian ini adalah ingin mengetahui implementasi dari perda kota Bandar Lampung nomor 10 tahun 2011 tentang rencana tata ruang wilayah tahun 2011-2030 di Kelurahan Gedong Meneng Kecamatan Rajabasa dan ingin mengetahui perspektif hukum Islam terhadap implementasi perda kota Bandar Lampung nomor 10 tahun 2011 tentang rencana tata ruang wilayah tahun 2011-2030 di Kelurahan Gedong Meneng Kecamatan Rajabasa.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan dilakukan untuk memahami kehidupan yang sebenarnya. Sifat penelitian deskriptif (menggambarkan) analisis. Metode pengumpulan data yaitu berupa wawancara dan observasi. Metode pengolahan data memeriksa dan memastikan data sudah relevan dengan masalah dan menyusun ulang agar dapat dipahami. Metode analisis data secara kualitatif menguraikan, menggambarkan data yang diperoleh dan disimpulkan secara induktif.

Berdasarkan hasil dari analisis dapat disimpulkan: 1. implementasi dari perda kota Bandar Lampung nomor 10 tahun 2011 tentang rencana tata ruang wilayah tahun 2011-2030 di Kelurahan Gedong Meneng Kecamatan Rajabasa sudah ada upaya namun belum sepenuhnya terealisasi karena: sosialisasi, pengawasan dan penegakan hukum. 2. perspektif hukum Islam terhadap implementasi perda kota Bandar Lampung nomor 10 tahun 2011 tentang rencana tata ruang wilayah tahun 2011-2030, sudah sesuai dengan syariat Islam implementasi di Kelurahan Gedong Meneng Kecamatan Rajabasa pemerintah desa sudah berupaya namun belum maksimal karena: kurangnya kesadaran masyarakat terhadap lingkungan dan penataan ruang.





**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

*Jl. H. Endro Suratmin, Sukarama, Bandar Lampung, 35313, Telp. (0721) 703260*

**PERSETUJUAN**

Nama : Dede Wardana  
NPM : 1421020061  
Jurusan : Siyasah Syar'iyah  
Fakultas : Syari'ah  
Judul : IMPLEMENTASI PERDA KOTA BANDAR LAMPUNG  
NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA TATA  
RUANG WILAYAH TAHUN 2011-2030 PERSPEKTIF  
HUKUM ISLAM (Studi di Kelurahan Gedong Meneng Kec.  
Rajabasa)

**MENYETUJUI**

Untuk di munaqasahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasah  
Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Dr. Hj. Erina Fane, S.H, M.Hum**

**NIP.197005022000032001**

**Agustina nurhavati, S.Ag, M.H.**

**NIP. 197408162003122004**

**Ketua Jurusan**

**Drs. Susiadi AS, M.Sos.I**

**NIP. 195808171993031002**





**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**  
**FAKULTAS SYARIAH**

*Jl. H. Endro Suratmin, Sukarama, Bandar Lampung, 35313, Telp. (0721) 703260*

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul : **Implementasi Perda Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2011-2030 Perspektif Hukum Islam (Studi Di Kelurahan Gedong Meneng Kecamatan Rajabasa)** oleh **Dede wardana NPM 14210200061 Jurusan Siyasaah Syar'iyah**, telah diujikan dalam Sidang Munaqasah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal:

**TIM DEWAN PENGUJI**

**Ketua : Dra. Firdaweri, M.H.I.**

**Sekretaris : Hendri yadi, S.H.I., M.H.I.**

**Penguji I : Dr. Liky Faisal, S.Sos., M.H.**

**Penguji II : Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H.**

**Dekan Fakultas Syari'ah**

**Dr. Alamsyah, S.Ag., M.Ag.**  
**NIP.197009011997031002**

### MOTTO

... وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ۚ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ

مُؤْمِنِينَ ﴿٨٥﴾

Artinya : ... dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Tuhan memperbaikinya. yang demikian itu lebih baik bagimu jika betul-betul kamu orang-orang yang beriman.

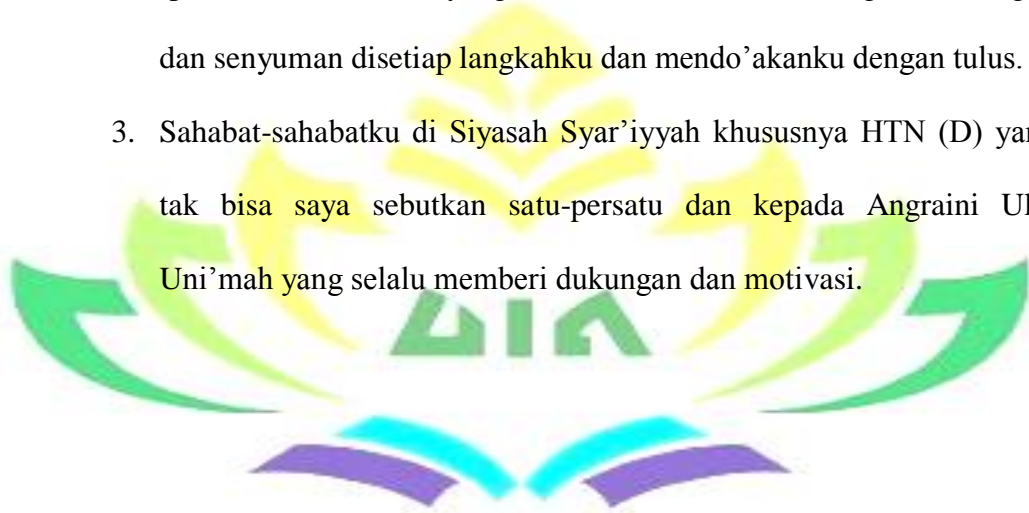
(Q.S. al-a'araf(7): 85.)



### **PERSEMBAHAN**

Dengan segala Kebahagiaan, kaya tulis ini saya persembahkan untuk orang-orang yang selalu mendukung terselesaikannya karya ini, diantaranya :

1. Kedua orang tuaku tercinta, Bapak SuWardi dan Ibu Atika yang senantiasa memberikan kasih sayang, bimbingan, motivasi, dukungan dan tiada henti-hentinya mendo'akan dan menuntun langkahku hingga tercapainya cita-cita ku.
2. Kakakku Dewi wartika, keponakanku Queen Iza Jaskia dan Kakak Ipar Sudirman Adas, yang selalu memberikan dukungan, semangat, dan senyuman disetiap langkahku dan mendo'akanku dengan tulus.
3. Sahabat-sahabatku di Siyasah Syar'iyah khususnya HTN (D) yang tak bisa saya sebutkan satu-persatu dan kepada Angraini Ulfa Uni'mah yang selalu memberi dukungan dan motivasi.



## **RIWAYAT HIDUP**

Penulis bernama Dede wardana lahir pada tanggal 14 februari 1996, di Desa Damarpura, Kecamatan Buana Pemaca, Kabupaten Oku Selatan. Putra dari pasangan Bapak Suardi dan Ibu Atika. Penulis merupakan anak ke dua dari dua bersaudara yaitu Kakak Dewi wartika.

Penulis memulai Pendidikan Sekolah Dasar di SD Negeri Damarpura diselesaikan pada tahun 2001 sampai dengan 2007, kemudian melanjutkan ke jenjang Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 1 Simpang diselesaikan pada tahun 2007 sampai dengan 2010, selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang Sekolah Menengah Kejuruan di SMK YPPB Belitang pada tahun 2010 dan diselesaikan pada tahun 2013. Kemudian pada tahun 2014 penulis melanjutkan pendidikannya pada program S1 dengan terdaftar menjadi mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung Fakultas Syariah dan Hukum jurusan Siyasah.

Bandar Lampung, Januari 2019

Yang membuat

**Dede Wardana**

**NPM. 1421020061**



## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Wr.Wb.*

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, atas karunia dan nikmat-Nya yang diberikan kepada kita. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “IMPLEMENTASI PERDA KOTA BANDAR LAMPUNG NO. 10 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH 2011-2030 (Studi di Kelurahan Medong Meneng Kec. Rajabasa”. Sebagai salah satu syarat guna mencapai gelar sarjana pada Fakultas Syariah dan Hukum jurusan Siyasah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Tidak lupa penulis mengucapkan terimakasih kepada pihak yang telah banyak membantu baik dalam bimbingan dan saran yang diberikan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu, iringan do’a dan ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag., selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Dr. Alamsyah, S.Ag.,M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang selalu tanggap terhadap kesulitan-kesulitan mahasiswa.
3. Drs. Susiadi AS, M.Sos.I. selaku Ketua Jurusan Siyasah yang telah memfasilitasi segala kepentingan mahasiswa.
4. Hj. Erina Fane. S.H., M.Hum. dan Agustina Nurhayati,S.Ag., M.H. masing-masing selaku Pembimbing I dan Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu disela-sela kesibukan, serta memberikan bimbingan, arahan dan motivasi penulis sehingga skripsi ini selesai.
5. Seluruh dosen Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sumbangan pemikiran selama penulis duduk di bangku kuliah hingga selesai.
6. Pimpinan dan karyawan perpustakaan fakultas Syari’ah dan institut yang telah memberikan informasi, data, referensi, dan lain-lain.

7. Teman Seperjuangan Siyasah terkhusus dan terkasih *Law and Politic Grup Class HTN D*, Ali Ma'ruf,S.H., Achmad Junaedy Muchtar,S.H., Ariza Rahmawati,S.H., Agustina Tri Widiastuti,S.H., Budi Santoso,S.H., Dede Wardana,S.H., Eka Budianta,S.E., Juwita Tri Utami,S.H., Krismanik Aji Chandra,S.H., Masmita,S.H., Muhammad Nurul Huda,S.H., Muhammad Harenggi,S.H.,MayaArmelia,S.H.,OrizaWulandari,S.H.,Reska Ismayni,S.H., Ulvi Maghvirotul Diniah,S.H., Wilda Zara Yunita,S.H., Wido Zuwika,S.H. yang semoga selalu dilancarkan segala urusannya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, hal itu tidak lain karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang penulis miliki. Akhirnya dengan keyakinan niat tulus ikhlas dan yakin usaha sampai semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca atau peneliti berikutnya untuk perkembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu siyasah.

*WassalamualaikumWr.Wb*

Bandar Lampung, Januari 2019

Penulis

**Dede Wardana**

**NPM. 1421020061**



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Penegasan Judul .....	1
B. Alasan Memilih Judul .....	2
C. Latar Belakang Masalah .....	2
D. Rumusan Masalah .....	7
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	8
F. Metode Penelitian .....	9
<b>BAB II PELESTARIAN LINGKUNGAN DALAM ISLAM DAN RUANG LINGKUP PERDA KOTA BANDAR LAMPUNG NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH TAHUN 2011-2030</b>	
A. Pelestarian lingkungan perspektif Hukum Islam .....	14
1. Pengertian Pelestarian lingkungan perspektif Hukum Islam....	14
2. Perintah Melestarikan lingkungan perspektif Hukum Islam....	16
3. Konsep Pelestarian lingkungan perspektif Hukum Islam.....	20
a. Seluruh .....	20
b. Jagat Raya .....	23
c. Ruang Tempat atau Bumi (al-ard) .....	24
d. Lingkungan Sebagai Ruang Kehidupan (al-bi'ah) .....	26
B. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandar Lampung .....	30
1. Pengertian Ruang, Tata Ruang dan Penataan Ruang .....	30
2. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).....	31
1. Tugas dan Wewenang RT/RW Penyelenggara Penataan Ruangg .....	37
2. Asas dan Tujuan Penataan Ruang .....	38
3. Pengertian penegakan Hukum Lingkungan .....	41
<b>BAB III HASIL PENNELITIAN</b>	
A. Keadaan Umum Kelurahan Gedong Meneng .....	44
1. Sejarah Singkat Kelurahan Gedong Meneng .....	44
2. Keadaan Geografis .....	47
3. Sosial Ekonomi.....	49



4. Sosial Budaya .....	49
5. Sarana Ibadah .....	50
6. Tingkat Pendidikan.....	51
7. Sarana Pendidikan .....	52
B. Potret Pembanguna Kelurahan Gedong Meneng .....	52
C. Implementasi Perda Kota Bandar lampung No 10 tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2011-2030.....	55

#### **BAB IV ANALISIS**

A. B Implementasi Perda Kota Bandar lampung No 10 tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2011-2030 di Kelurahan Gedong Meneng .....	59
B. Pandangan Hukum Islam Terhadap Implementasi Perda Kota Bandar lampung No 10 tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2011-2030 di Kelurahan Gedong Meneng .....	61

#### **BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

A. Kesimpulan .....	64
B. Rekomendasi .....	64

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN**

- Lampiran 1 Surat keterangan wawancara
- Lampiran 2 Surat Ijin Riset



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Penegasan Judul**

Peneliti memandang perlu memberikan penegasan judul untuk memahami proposal skripsi ini “Implementasi Perda Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2011-2030 Perspektif Hukum Islam (Studi Kelurahan Gedong Meneng Kec. Rajabasa)”, terlebih dahulu diperjelas kalimat-kalimat yang dianggap perlu.

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah di susun secaramatang dan terperinci. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan kepala daerah (gubernur atau bupati/ walikota). Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.<sup>1</sup> Hukum Islam adalah Hukum yang di bangun berdasarkan pemahaman manusia atas Nash Al-Qur'an maupun sunah untuk mengatur kehidupan manusia yang berlaku secara universal, relepan pada setiap zaman dan tempat manusia.<sup>2</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa maksud dari judul ini sebagaimna menjelaskan tentang tindakan atau implementasi dari peraturan daerah tentang tata ruang kota dikabupaten/ kota kususny di

---

<sup>1</sup>Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang

<sup>2</sup>Said Aqil Husin AL-Munawar, *Hukum Islam dan Pluralitas social*, (Jakarta: penamadi,2005), hlm 06

kelurahan Gedung Meneng Kecamatan Rajabasa yang akan dikaji dalam perspektif Hukum Islam.

## **B. Alasan Memilih Judul**

Adapun alasan penulis memilih judul skripsi ini “Implementasi Perda Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2011-2030 Perspektif Hukum Islam (Studi Kelurahan Gedung Meneng Kec. Rajabasa)” adalah sebagai berikut:

### **1. Alasan Objektif**

Permasalahan dilapangan menarik penulis ingin meneliti mengenai “Implementasi Perda Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2011-2030 Perspektif Hukum Islam (Studi Kelurahan Gedung Meneng Kec. Rajabasa)”.

2. Peneliti mengangkat judul ini dikarenakan adanya relevansi antara judul dengan program studi penulis, dan lokasi penelitian yang mudah di jangkau.

## **C. Latar Belakang Masalah**

Sesungguhnya tidak ditemukan konsep tata kota Islam yang baku apalagi yang bersifat teknis-mekanistik Tentang Tata Kota dalam ajaran Islam. Namun ajaran Islam mempunyai prinsip-prinsip dalam hal penataan kota yang menjadi *guidance* dalam membuat kebijakan penataan sebuah kota.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup>MT. Dyayadi, “*Tata Kota Menurut Islam*”, (Jakarta: Pustaka AL-Kautsar Grup, 2008) cet. Ke-1, hal-118



Madinah sebagai kota percontohan yang dikelola Rasulullah Saw. mensyaratkan kesejukan dengan menjaga pepohonan. Kota Madinah belum memiliki transportasi yang dapat mengeluarkan polutan karbon monoksida yang dikeluarkan oleh mobil, sepeda motor, pabrik-pabrik yang mengeluarkan asap dan sebagainya.

Pepohonan tidak hanya merupakan lambang kesejukan, namun pepohonan merupakan bagian dari kehidupan manusia itu sendiri. Betapa tidak, pepohonan adalah media siklus udara yang dibutuhkan manusia. Pepohonanlah yang menjadi sumber adanya udara bersih yang kita hirup. Kekurangan udara bersih berarti mengurangi hak hidup manusia itu sendiri.

Bayangkan saja saat ini kita mulai merasakan suhu udara yang menggerahkan, curah hujan dan musim yang tidak menentu. Karenanya, tidak salah jika dikatakan hutan adalah paru-paru dunia. Tanpa pohon-pohon anseolah dunia kehilangan paru-parunya untuk bernafas dan selanjutnya melenyapkan kehidupan ini. Lebih dari itu, pepohonan merupakan penangkal terjadinya malapetaka pada sebuah kota.

Sebab pada pohonlah sistem keseimbangan ketersediaan dan penyimpanan air terjadi. Kebutuhan akan air atau kelebihan terhadap pasokan air yang datang melalui banjir akan diseimbangkan oleh pohon-pohonan. Karenanya, penataan kota secara teratur, tersistem rapi, *green city* merupakan keniscayaan dalam kehidupan perkotaan. Islam sebagai sistem nilai melalui Al-Quran dan contoh tauladan Rasulullah Saw. Telah mengajarkan dan menuntun

manusia untuk dapat menata tempat tinggalnya dalam rangka kemaslahatan manusia itu sendiri.

Pada dasarnya pembangunan berkelanjutan berangkat dari satu tujuan yang mulia yaitu mencapai kualitas hidup yang lebih baik bagi semua, untuk saat ini, esok dan generasi mendatang. Pada pelaksanaan pembangunan nasional, sudah tidak dapat dipungkiri bahwa dalam perkembangannya akan dihadapkan dengan tantangan terjadinya degradasi kualitas lingkungan yang saat inipun telah mulai dirasakan dampaknya oleh masyarakat. Oleh karenanya, kebijakan pembangunan kedepan harus mampu mendorong peningkatan kualitas lingkungan, baik dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengoperasian maupun dalam proses pemeliharaan.<sup>4</sup>

Menurut Pasal 19 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang ditegaskan bahwa struktur ruang memuat susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarki memiliki hubungan fungsional. Sementara itu pola ruang memuat distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang.

Ketersediaan sumber daya sangat terbatas sehingga diperlukan strategi pengelolaan yang tepat bagi pelestarian lingkungan hidup agar kemampuan

---

<sup>4</sup>M.daud silalahi, *Hukum Lingkungan, dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, (Alumni Bandung, 2001), hlm. 88

serasi dan seimbang untuk mendukung keberlanjutan hidup manusia. Memajukan kesejahteraan generasi sekarang melalui pembangunan berkelanjutan dilakukan berdasarkan kebijakan terpadu dan menyeluruh tanpa mengabaikan kebutuhan generasi mendatang. Strategi pengelolaan yang dimaksud yaitu upaya sadar, terencana, dan terpadu dalam pemanfaatan, penataan, pemeliharaan, pengawasan, pengendalian, pemulihan, dan pengembangan sumberdaya secara bijaksana untuk meningkatkan kualitas hidup. lanjut mengenai apa dan bagaimana wujud dampak tersebut, sehingga sedini mungkin.<sup>5</sup>

Kebijakan pembangunan berkelanjutan tentu tidak bisa dilepaskan dari instrument hukum tata ruang. Melalui instrument tata ruang berbagai kepentingan pembangunan baik antara pusat dan daerah, antardaerah, antarsektor maupun antarpemangku kepentingan dapat dilakukan dengan selaras, serasi, seimbang, dan terpadu.

Kebutuhan ruang dalam pelaksanaan pembangunan berimplikasi terhadap penggunaan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang. Perda Kota Bandar Lampung No 10 tahun 2011 tentang tata ruang wilayah tahun 2011-2030 menjelaskan tentang peran dan fungsi RT/RW. Melalui RT/RW ini penggunaan ruang telah dikelompokkan berdasarkan struktur dan fungsi ruang. Struktur dan fungsi ruang inilah yang seharusnya menjadi dasar dalam penggunaan ruang.

---

<sup>5</sup>Muhammad Akib, Charles Jackson, Agus Triono, Marlia Eka P, *Hukum Penataan Ruang*, (PKKPUU FH UNILA Bandar Lampung, 2013), hlm. 2



Kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan peruntukan ruang sebagaimana ditetapkan dalam RTRW menimbulkan berbagai permasalahan lebih lanjut, seperti tumpang tindih penggunaan ruang, alih fungsi lahan, konflik kepentingan antar sektor (Lingkungan, prasarana wilayah, dan lain-lain), dan konflik antara pusat dan daerah, konflik antar daerah, serta kemerosotan dan kerusakan lingkungan hidup.

Berbagai kenyataan di atas, menjadi permasalahan di berbagai Wilayah Kota Bandar Lampung terutama di Kelurahan Gedong Meneng. Dalam pemanfaatan Tata Ruang Wilayah Kota Bandar Lampung, terkesan adanya pola yang mengarah pada eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan.

Pada taraf peruntukan dan pemakaian yang telah ada selama ini, pemanfaatan Tata Ruang di Kota Bandar Lampung telah keluar dari jalur sebagaimana yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Pada pemanfaatan Tata Ruang yang ada sekarang ini dapat dilihat bagaimana areal peruntukan bagi kawasan resapan air yang idealnya harus dipertahankan malah di eksploitasi secara berlebihan, secara kasat mata jelas sekali bahwa areal penghijauan dan peresapan saat ini tidak lebih dari 40 %. Areal penghijauan dan peresapan tersebut telah di eksploitasi secara berlebihan dan pemanfaatan tata ruang yang tidak sesuai dengan kebijakan tata ruang.<sup>6</sup>

Sebagaimana diketahui kota Bandar Lampung memiliki lingkungan hidup yakni berupa taman kota, dan hutan, yang dilindungi oleh pemerintah pusat

---

<sup>6</sup> Ibid. h 3

maupun pemerintah daerah. Kelangsungan lingkungan hidup tersebut mempunyai dampak yang sangat signifikan bagi masyarakat yang ada di Kelurahan Gedong Meneng.

Lingkungan hidup yang rusak dapat mengakibatkan banjir, tetapi berdampak juga kepada daerah-daerah lain disekitarnya. Untuk itu pengelolaan lingkungan hidup ini perlu memperhatikan fungsi tata ruang. Rencana tata ruang yang ada lebih menitikberatkan pada kecenderungan untuk mengalokasikan kawasan kepada arah eksploitasi secara berlebihan.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti tertarik mengangkat topik tersebut menjadi sebuah penelitian yang berjudul “Implementasi Perda Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2011-2030 Perspektif Hukum Islam (Studi Kelurahan Gedong Meneng Kec.Rajabasa)”.

#### **D. Rumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang yang dikemukakan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi Perda Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2011-2030 di Kelurahan Gedong Meneng?
2. Bagaimana Perspektif Hukum Islam terhadap Implementasi Perda Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2011-2030 di Kelurahan Gedong Meneng?

## **E. Tujuan Penelitian dan Kegunaan**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui Implementasi Perda kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Tata Ruang Wilayah Tahun 2011-2030 di Kelurahan Gedong Meneng.
- b. Untuk mengetahui Perspektif Hukum Islam terhadap Implementasi Perda Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Tata Ruang Wilayah Tahun 2011-2030 di Kelurahan Gedong Meneng.

### **2. Kegunaan Penelitian**

Manfaat penelitian tentang FungsidanPeran RT/RW di Kelurahan Gedong Meneng dalam penegakan Hukum yaitu sebagai berikut :

- a. Untuk pengembangan ilmu pengetahuan hukum yang ada hubungannya dengan hukum tata ruang dan hukum lingkungan hidup.
- b. Untuk memberikan masukan kepada masyarakat tentang begitu pentingnya arti tata ruang bagi lingkungan hidup. Selain itu bagi pemerintah dapat memberikan masukan dalam hal pengambilan mengenai kebijakan tata ruang.

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian ini adalah suatu tata cara bagi mna suatu penelitian itu di laksanakan:<sup>7</sup>

### **1. Jenis dan Sifat Penelitian**

#### **a. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan di lakukan untuk kancan kehidupan yang sebenarnya. Penelitian lapangan yaitu penelitian dengan karakteristik masalah yang yang berkaitan dengan latar belakang dan kondisi saat ini dari subjek yang di teliti serta intraksinya dengan lingkungan.<sup>8</sup>

Penelitian ini dengan menggali data yang bersumber dari lapangan yaitu berupa wawancara (*interview*) terhadap masyarakat Kelurahan Gedong Meneng tentang Implementasi Perda Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2011-2030.

#### **b. Sifat Penelitian**

Penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini bersifat deskriptif (menggambarkan) analisis, yaitu penelitian yang menuturkan dan menguraikan data yang telah ada. Data-data yang dapat diambil

---

<sup>7</sup>Susiadi AS, *Metodologi Penelitian*, (Bandar Lampung: 2015), hlm. 21

<sup>8</sup>Elta Mamang Sangaji, *Metode Penelitian Pendekatan Praktik dalam Penelitian*, (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2010), hlm. 21



sebagai rujukan untuk selanjutnya dianalisis secara sistematis untuk menunjang dalam pembahasan.

Bentuk penelitian deskriptif yang digunakan yaitu studi analisis keritis. Yaitu penelitian yang berusaha mencari pemecahan analisa Implementasi Perda Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2011-2030.

## **2. Populasi dan Sampel**

- a. Populasi digunakan untuk menyebutkan seluruh elemen/anggota dari seluruh wilayah yang menjadi sasaran penelitian.<sup>9</sup> Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah perangkatpemerintahan desa seperti, Lurah, pegawai Kelurahan, RT/RW dan masyarakat kelurahan Gedong Meneng seperti Tokoh Agama, dan Masyarakat Desa.
- b. Sampel, sampel yang digunakan adalah *Purposive Sampling*, penentuan sampel dalam teknik ini dengan pertimbangan khusus sehingga layak dijadikan sampel.<sup>10</sup> Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik sampling dimana dari perangkat kelurahanyang menjadi sampel adalah 10 orang dari kelurahan dan masyarakat yaitu, 1 orang Lurah, , 1 orang RT/RW, 1orang tokoh Agama, 1orang tokohmasyarakat, dan 6 orang Masyarakat Desa.

---

<sup>9</sup>Juliansyah, *Metode Penelitian* (Jakarta: Kencana, 2010) h.147.

<sup>10</sup>*Ibid*, h.155

- c. Sumber Data, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Data Primer

Data primer ialah “data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung dilapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukan.”<sup>11</sup>

Data primer didapat dari sumber *informan* yaitu individu atau perseorangan seperti hasil wawancara yang dilakukan peneliti. Dalam skripsi ini penelitian dilakukan di kelurahan Gedung meneng.

2) Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber lain yang berada di luar lapangan penelitian atau bersipat data penunjang. Data sekunder ini diperoleh dari studi kepustakaan.

### 3. Metode Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data dalam penelitian, menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah merupakan salah satu metode pengumpulan data yang diselenggarakan atau dilakukan dengan cara mengadakan tanya jawab baik secara langsung maupun tidak langsung dengan sumber data.

---

<sup>11</sup>Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002) h.82

Dalam hal ini menggunakan jenis interview bebas terpimpin yang dimaksud agar tidak terjadi kekakuan tapi terserah dengan pedoman yang ditetapkan.<sup>12</sup>

Interview ditunjukkan kepada Lurah, Masyarakat dan Tokoh masyarakat, Tokoh Agama Kelurahan Gedong Meneng.

b. Observasi

Observasi, adalah penelitian turun langsung kelapangan untuk meninjau secara dekat permasalahan yang diteliti.

c. Dokumentasi

Dokumentasi, adalah proses pengumpulan data melalui menghimpun data yang tertulis dan tercetak. Menurut Suaharsimi Arikunto menyatakan bahwa dokumentasi adalah “Mencari data mengenai hal-hal atau variable majalah, prasasti, notulen rapat agenda dan sebagainya.

#### **4. Metode Pengolahan Data**

Data yang terkumpul kemudian diolah pengadaaan data umumnya dilakukan dengan caraantara lain:

- a. Pemeriksaan data yaitu mengoreksi apakah data yang dikumpul sudah cukup lengkap, benar, sesuai atau relevan dengan masalah.<sup>13</sup>
- b. Rekonstruksi data yaitu menyusun ulang secara teratur, berurutan logis sehingga mudah dipahami dan di interprestasikan.

---

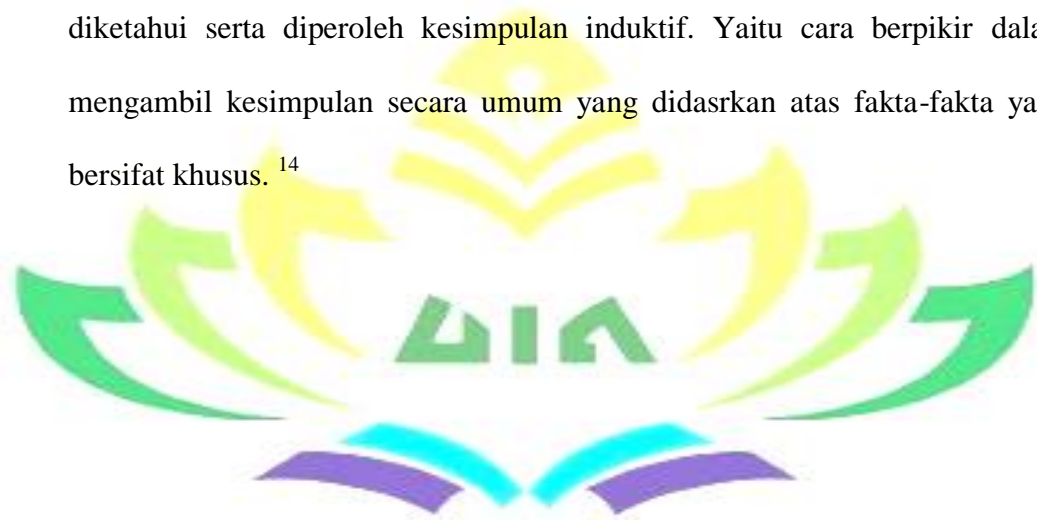
<sup>12</sup>Sutrisno Hadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta:Rieneka Cipta 2006), hlm 72

<sup>13</sup>CholidNarbuto, *MetodePenelitian*, (Jakarta: BumiAksara, 2013), hlm. 83

- c. Sistematis data yaitu penempatan-penempatan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.

## 5. Metode Analisis Data

Analisis data yang diperoleh dilakukan dengan cara analisis kualitatif yaitu analisis kualitatif yang dipergunakan untuk aspek-aspek normatif (yuridis) melalui metode yang bersifat deskriptif analisi, yaitu “menguraikan gambaran dan data yang diperoleh dan menghubungkan satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan umum”. Dari hasil analisis tersebut dapat diketahui serta diperoleh kesimpulan induktif. Yaitu cara berpikir dalam mengambil kesimpulan secara umum yang didasarkan atas fakta-fakta yang bersifat khusus.<sup>14</sup>



---

<sup>14</sup>Soerjino Soekanto, *Pengantar Penelitian* (Jakarta : Universitas Indonesia Press, 1986) h.112

## **BAB II**

### **PELESTARIAN LINGKUNGAN DALAM ISLAM DAN RUANG LINGKUP PERDA KOTA BANDAR LAMPUNG NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG TATA RUANG WILAYAH TAHUN 2011-2030**

#### **A. Pelestarian Lingkungan Perspektif Hukum Islam**

##### **1. Pengertian Pelestarian Lingkungan Perspektif Hukum Islam**

“Pelestarian” kata pelestarian berasal dari kata “lestari” yang berarti tetap seperti keadaan semula, tidak berubah, bertahan kekal. Kemudian mendapatkan tambahan pe- dan akhiran -an, menjadi pelestarian yang berarti; proses, cara, perbuatan melestarikan: perlindungan dari kemusnahan dan kerusakan, pengawetan, konservasi; pengelolaan sumber daya alam yang menjamin kemanfaatannya secara bijaksana dan menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragamannya.

Lingkungan adalah daerah (kawasan dsb) yg termasuk di dalamnya, bagian wilayah di kelurahan yg merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan desa, golongan; kalangan: ia berasal dari bangsawan, semua yg mempengaruhi pertumbuhan manusia atau hewan: kita harus mencegah pencemaran.<sup>15</sup>

Pelestarian Lingkungan dalam arti, pengelolaan, sangat erat kaitannya dengan pemanfaatan lingkungan bagi kehidupan manusia sebab lingkungan

---

<sup>15</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Edisi III; Jakarta: Balai Pustaka, 2001), h. 665



memiliki nilai-nilai yang konstruktif bagi kehidupan di seputar lingkungan itu sendiri. Pelestarian lingkungan dalam arti yang luas memberikan dampak yang positif bagi kelangsungan dan kemakmuran hidup manusia.

Batasan pelestarian lingkungan dalam makna menyatukan seluruh populasi dalam satu ekosistem berarti adanya rasa saling membutuhkan secara keseluruhan. Adanya ekosistem yang saling memberikan manfaat, itu menunjukkan setiap populasi memiliki nilai guna atas yang lainnya.

Lingkungan hidup tidak saja bersifat fisik seperti tanah, udara, air, cuaca dan sebagainya, namun dapat juga berupa sebagai lingkungan hidup maupun lingkungan sosial.<sup>16</sup> Lingkungan sosial meliputi antara lain semua faktor atau kondisi di dalam masyarakat yang dapat menimbulkan pengaruh atau perubahan sosiologis, misalnya: ekonomi, politik dan sosial budaya. Lingkungan meliputi, yang dinamis (hidup) dan yang statis (mati).Lingkungan dinamis meliputi wilayah manusia, hewan dan tumbuh tumbuhan.Lingkungan statis meliputi alam yang diciptakan Allah swt, dan industri yang diciptakan manusia.

Dalam sunah Rasulullah SAW jauh-jauh hari sudah menegaskan pentingnya menjaga lingkungan perkotaan. Rasulullah memberikan contoh kota madinah, dimana beliau mempertahankan pepohonan dan melarang penebangan atau merusak / mengganggu lingkungan kota tersebut.

Menurut hukum Islam penataan kota harus mengutamakan hal-hal sebagai berikut;

---

<sup>16</sup> Slamet Riyadi, *Ekologi Ilmu Lingkungan Dasar-dasar dan Pengertiannya* (Surabaya: Usaha Nasional, 1998), h.22.

## 1. Lokasi masjid mudah dijangkau

Hendaknya masjid diletakan di tengah-tengah kompleks perumahan tersebut sebagai sentral aktifitas masyarakat. Lokasi masjid seperti itu menjadikan jarak setiap warga menuju masjid dekat dari semua arah. Secara psikologis, masjid yang berada di tengah masyarakat mengisyaratkan simbol ruhaniyah.

masyarakat akan memiliki kedekatan dan keterikatan dengan nilai-nilai kebaikan karena terkoneksi oleh masjid. Sebaliknya, bila masjid terletak dipinggiran. Terisolir dari penduduk, dan sulit dijangkau akan menimbulkan kesan ruhaniyah yang berbeda pula.

Apabila kita melihat aktivitas Rasulullah sesaat beliau dan sahabat Muhajirin diterima sahabat Anshar di Madinah, yang beliau lakukan adalah membangun masjid sebagai sebuah markas pergerakan dakwah islam waktu itu, masjid mempunyai pengaruh yang besar dalam mengikat persaudaraan dan menguatkan ikatan diantara mereka.

## 2. Kota ramah lingkungan

Cobalah sekali-kali kita membayangkan sebuah kota, dengan gedung-gedung yang menggunakan sel surya (*sollar cel*) sebagai pembangkit energi memakai lampu hemat listrik, dan adanya skema daur ulang limbah. Sebuah kota dengan sarana transportasi massa yang efisien dan kendaraan-kendaraan yang berlalu lalang digerakkan dengan listrik atau hidrogen sehingga tidak

memuntahkan polusi udara.

Kota ramah lingkungan seperti diilustrasikan di atas memang masih sulit menjadi mimpi, tetapi hal tersebut bisa dicapai dengan adanya kerjasama dari semua pihak yang bertanggung jawab dalam memelihara lingkungan.

### 3. Memperbaiki lingkungan

lingkungan menjadi sektor yang rentan terhadap konflik jangka pendek dan cenderung dikalahkan oleh kepentingan lain (terutama ekonomi). Lingkungan merupakan sebuah ekosistem, semua aspek kehidupan, baik ekonomi, sosial, politik, ekologi terkait satu sama lain, sehingga perubahan disatu aspek mempengaruhi perubahan pada aspek yang lain. Maka dari itu perlu saling mendukung dan kerjasama dari berbagai aspek. Sebab tujuan semua aspek pada hakikatnya sama yaitu menuju kehidupan yang lebih baik lagi.

## 2. Perintah Melestarikan Lingkungan Perspektif Hukum Islam

Al-Qur'an menjelaskan bahwa kerusakan lingkungan adalah akibat dari perbuatan kita sendiri (manusia) sebagaimana dijelaskan dalam Q.S. al-Rum/30: 41;

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي  
عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٤١﴾

Artinya: *Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan Karena perbuatan tangan manusia, Allah menghendaki merka merasakan*

*sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).*<sup>17</sup>

Selain untuk beribadah kepada Allah, manusia juga diciptakanlah sebagai Khalifah dimuka bumi. Sebagai khalifah, manusia memiliki tugas untuk memanfaatkan, mengelola dan memelihara alam semesta. Allah telah menciptakan alam semesta untuk kepentingan dan kesejahteraan semua makhluk Nya, khususnya manusia.

Keserakahan dan perlakuan buruk sebagian manusia terhadap alam dapat menyengsarakan manusia itu sendiri. Tanah longsor, banjir, kekeringan, tata ruang daerah yang tidak karuan dan udara serta air yang tercemar adalah buah kelakuan manusia yang justru merugikan manusia dan makhluk hidup lainnya.

Islam mengajarkan agar umat manusia senantiasa menjaga lingkungan. Hal ini seringkali tercermin dalam beberapa pelaksanaan ibadah, seperti ketika menunaikan ibadah haji. Dalam haji, umat Islam dilarang menebang pohon-pohon dan membunuh binatang. Apabila larangan itu dilanggar maka ia berdosa dan diharuskan membayar denda (dam). Lebih dari itu Allah swt.melarang manusia berbuat kerusakan di muka bumi Tentang memelihara dan melestarikan lingkungan hidup, banyak upaya yang bisa dilakukan, seperti yang terdapat pada amanat GBHN, rehabilitasi SDA berupa hutan, tanah dan air yang rusak perlu ditingkatkan lagi.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Dapartemen Agama RI, *Al-quran dan terjemahannya*.

<sup>18</sup> Kharismaway, "Ayat Tentang Perintah Menjaga Kelestarian Lingkung." Blog Khrismaway, <http://kharismaway.blogspot.com/> 2012/ 06/ telah-nampak-kerusakan-didaratdan-di.html. (30 September 2013)

Dalam lingkungan ini program penyelamatan hutan, tanah dan air perlu dilanjutkan dan disempurnakan. Pendayagunaan daerah pantai, wilayah laut dan kawasan udara perlu dilanjutkan dan makin ditingkatkan tanpa merusak mutu dan kelestarian lingkungan hidup. Manusia sebagai makhluk Allah swt. yang termulia diperintahkan untuk selalu berbuat baik dan dilarang untuk berbuat kerusakan di atas bumi, Allah berfirman : Q.S. al-A'rāf/7: 85;

وَالِى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَتَقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِّنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخُسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُمْسِكُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٨٥﴾

Artinya: ... janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi setelah (diciptakan) dengan baik. itulah yang lebih baik bagimu jika kamu orang-orang yang beriman.<sup>19</sup>

Ayat di atas, melarang untuk merusak lingkungan, dan justru sebaliknya yakni ayat tersebut menganjurkan manusia untuk berbuat baik dan atau memelihara lingkungannya.

Allah swt. telah sangat jelas menerangkan kepada kita bahwa betapa pentingnya lingkungan hidup ini untuk di lestarikan guna untuk kelangsungan kita hidup di dunia ini. Dan telah menjadi kewajiban bagi kita ummat manusia

<sup>19</sup> Departemen Agama RI, *Al-quran dan terjemahannya*.



untuk senantiasa mewujudkan kelestarian Bumi sebagai tempat tinggal dan tempat hidup manusia dan makhluk Allah lainnya.

Sudah dijadikan Allah dengan penuh rahmat-Nya. Gunung-gunung, lembah-lembah, sungai-sungai, lautan, daratan dan lain-lain semua itu diciptakan Allah untuk diolah dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh manusia, bukan sebaliknya dirusak dan dibinasakan. Hanya saja ada sebagian kaum yang berbuat kerusakan di muka bumi.

Mereka tidak hanya merusak sesuatu yang berupa materi atau benda, melainkan juga berupa sikap, perbuatan tercela atau maksiat serta perbuatan jahiliyah lainnya. Akan tetapi, untuk menutupi keburukan seringkali mereka menganggap diri mereka sebagai kaum yang melakukan perbaikan di muka bumi, padahal justru merekalah yang berbuat kerusakan di muka bumi Allah swt. Melarang umat manusia berbuat kerusakan di muka bumi karena Dia telah menjadikan manusia sebagai khalifah-Nya.

Allah menegaskan bahwa salah satu karunia besar yang dilimpahkan kepada hamba-Nya ialah Dia menggerakkan angin sebagai tanda kedatangan rahmat-Nya. Angin yang membawa awan tebal, dihalau ke negeri yang kering dan telah rusak tanamannya karena tidak ada air, sumur yang menjadi kering karena tidak ada hujan, dan kepada penduduk yang menderita lapar dan haus.

Lalu Dia menurunkan hujan yang lebat di negeri itu sehingga negeri yang hampir mati tersebut menjadi subur kembali dan penuh berisi air.

Dengan demikian, Dia telah menghidupkan penduduk tersebut dengan penuh kecukupan dan hasil tanaman-tanaman yang berlimpah ruah.

Dalam hal pelestarian lingkungan ini terdapat perbedaan amalan orang beriman dengan orang kafir yang dijelaskan Allah dalam Q.S.

Shaad/38: 27;

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ۚ ذَٰلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا ۖ فَوَيْلٌ

لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ ﴿٢٧﴾

Artinya: *“Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada diantara keduanya dengan sia-sia. Itu anggapan orang-orang kafir, maka celakalah orang-orang kafir itu karena mereka akan masuk neraka.”*<sup>20</sup>

Allah SWT menjelaskan bahwa dia menjadikan langit, bumi dan makhluk apa saja yang berada diantaranya tidak sia-sia. Langit dengan segala bintang yang menghiasi, matahari yang memancarkan sinarnya di waktu siang, dan bulan yang menampilkan bentuknya yang berubah-ubah dari malam ke malam serta bumi tempat tinggal manusia, baik yang tampak dipermukaannya maupun yang tersimpan didalamnya, sangat besar artinya bagi kehidupan manusia. Kesemuanya itu diciptakan Allah atas kekuasaan dan kehendak-Nya sebagai rahmat yang tak ternilai harganya.

---

<sup>20</sup> Departemen Agama RI, *Al-quran dan terjemahannya*.

### 3. Konsep Pelestarian Lingkungan Perspektif Hukum Islam

Dalam Islam, konsep lingkungan diperkenalkan al-Qurʿan dengan beragam term. Yaitu term seluruh spesies, al-ʿalamiin, ruang waktu, al-sama bumi, al-ard, dan lingkungan, al-biʿah.<sup>21</sup> Berikut ini akan dijabarkan masing-masing istilah.

#### 1. Seluruh Spesies (*al-ʿalamiin*)

secara kuantitas, kata al-ʿalamin disebutkan dalam al-Qurʿan sebanyak 71 kali baik dalam bentuk frasa, idha-fiyah, atau gabungan kata, syibhu al-jumlah. Sedangkan secara kualitas kata al-ʿalamin tidak selalu berkonotasi seluruh spesies, akan tetapi digunakan pula dalam konteks makhluk berakal yakni manusia.

Hal ini berbeda dengan tesis Sirajuddin Dzar yang menyatakan bahwa kata al-ʿalamiin dalam al-Qurʿan hanya berkonotasi makhluk berakal yakni manusia saja. Sebab pada kenyataannya, ketika kata al-ʿalamiin ditempatkan dalam frasa posesif, idha-fiyah milkiyah, sebagai mudhaaf kata Tuhan, rabbun, atau kata depan li dan ʿan dan yang lain justru berarti seluruh spesies manusia saja.

#### a. Al-ʿAlamiin berkonotasi Spesies Manusia

Sedangkan kata al-ʿalamiin yang berkonotasi makhluk berakal yakni spesies manusia diungkapkan dalam al-Qurʿan sejumlah 25 kali. Secara

---

<sup>21</sup> Muttaqin Chori, *Evolusi Ra'y Dalam Pembentukan Hukum Islam*, Al-adalah Vol. XII, (Bandar Lampung: Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung, 04 Desember 2015) hlm 744 (On-Line) Tersedia di: <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.adalah/article/view/211>.

teknis kedua puluh lima kali penggunaan tersebut seluruhnya digabungkan dengan beberapa kata depan, ahurf yakni kata depan, alaa, li, ‘an dan min.<sup>22</sup>

Kata al-‘alamiin yang digabung dengan kata depan allaa seperti yang terdapat pada Q.S. al-Baqarah 2: 47;

يٰۤاَيُّهَا اِسْرَآءِیْل اذْكُرُوْا نِعْمَتِیْ الَّتِیْ اَنْعَمْتُ عَلَیْكُمْ وَاَنْتِیْ فَضَّلْتُكُمْ عَلَی الْعٰلَمِیْنَ ﴿٤٧﴾

Terjemahnya: *wahai Bani Israil, ingatlah nikmat-Ku yang telah Aku berikan kepadamu dan Aku telah melebihkan kamu dari semua umat yang lain di alam ini (pada masa itu).*<sup>23</sup>

Jika dicermati kata al-‘alamiin yang digabung dengan kata depan sebagaimana terdapat pada ayat-ayat al-Qur‘an di atas ternyata semuanya berkonotasi alam semesta atau seluruh spesies. Sebab, berdasarkan konteks wicaranya dengan semua tidak hanya berkaitan dengan manusia melainkan berkaitan dengan seluruh spesies.

#### **b. Al-‘Alamiin berkonotasi Spesies Manusia**

Sedangkan kata al-‘alamiin yang berkonotasi makhluk berakal yakni spesies manusia diungkapkan dalam al-Qur‘an sejumlah 25 kali. Secara teknis kedua puluh lima kali penggunaan tersebut seluruhnya digabungkan dengan beberapa kata depan, ahurf yakni kata depan „alaa, li, ‘an dan min. Sebagai contoh dapat disajikan sebagai berikut:

<sup>22</sup> Mujiono Abdillah, *Agama Ramah Lingkungan Perspektif Al-Qur‘an* (Cet I; Jakarta: Paramadina, 2001),

<sup>23</sup> Departemen Agama RI, *Al-quran dan terjemahannya*.

Kata al-‘alamiin yang digabung dengan kata depan allaa seperti yang terdapat pada Q.S. al-Baqarah/2: 47;

يٰۤاَيُّهَا اِسْرَآءِیْل اٰذْكُرُوْا نِعْمَتِیْ الَّتِیْ اَنْعَمْتُ عَلَیْكُمْ وَاَنْیْ فَضَّلْتُكُمْ عَلٰی الْعٰلَمِیْنَ



Artinya: *wahai Bani Israil, ingatlah nikmat-Ku yang telah Aku berikan kepadamu dan Aku telah melebihkan kamu dari semua umat yang lain di alam ini (pada masa itu).*<sup>24</sup>

## 2. Jagat Raya (*al-samaa'*)

Ungkapan yang digunakan oleh al-Qur‘an untuk memperkenalkan jagat raya adalah kata *al-samaa'* dan derivisi bentuk jamaknya yakni *al-samaawaat*. Secara kuantitas kata *al-samaa'* dan derivisinya digunakan dalam al-Qur‘an sebanyak 387 kali. Bentuk tunggal, mufrad, yakni *al-samaa'* diulangi sebanyak 210 kali dan bentuk jamak *al-samaawaat* diulang sebanyak 177 kali. Secara etimologi term *al-samaa'* dan derivasinya berakar pada kata *samaa*, *yasmuu*, *sumuawan*, *wa samaa'an* secara terminologi, kata *al-samaa'* dan derivasinya berarti langit, jagat raya, ruang angkasa dan ruang waktu.<sup>25</sup>

Adapun contoh secara kontekstual term *al-samaa'* dan derivasinya dalam al-Qur‘an dengan berbagai konotasinya adalah sebagai berikut:

<sup>24</sup> Departemen Agama RI, *Al-quran dan terjemahannya*.

<sup>25</sup> Achmad Baiquni, *al-Qur'an Ilmu Pengetahuan dan Teknologi* (Cet. 1; Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1994), h. 29



Berkonotasi jagad raya seperti al-Qur'an surat al-Baqarah/2: 22;

الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٢﴾

Artinya: *(Dialah) yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap, dan Dialah yang menurunkan air (hujan) dari langit, lalu dia menghasilkan dengan (hujan) itu buah-buahan sebagai rezki untukmu, Karena itu janganlah kamu mengadakan tandingan-tandingan bagi Allah, padahal kamu mengetahui.*<sup>26</sup>

Walaupun data pengungkapan al-Qur'an tentang term al-samaa' bervariasi konotasinya yakni berkonotasi ruang udara, ruang angkasa dan ruang jagad raya, namun jika dicermati keseluruhan konotasi tersebut adalah bermuara pada alam jagad raya. Karena jagad raya terdiri dari ruang udara atau biospher dan ruang angkasa atau lithospher dan stratospher.

Dengan demikian, cakupan landasan untuk menyatakan bahwa jagad raya yang meliputi ruang atmospher dan biospher merupakan salah satu term yang digunakan oleh al-Qur'an untuk mengungkapkan istilah lingkungan. Sebab, secara faktual lingkungan jagad raya hakikatnya terdiri dari ruang udara atau atmosfer dan ruang angkasa spacephere.<sup>27</sup>

### 3. Ruang Tempat atau Bumi (*al-Ard'*)

Secara kuantitas kata ruang tempat atau bumi, al-Ard' digunakan dalam al-Qur'an sebanyak 463 kali muncul secara sendirian atau

<sup>26</sup> Departemen Agama RI, *Al-quran dan terjemahannya*.

<sup>27</sup> Mujiono Abdillah, *op. cit.*, h. 44.

digabungkan dengan kata tugas. Sedangkan secara kualitas, kata al-Ard' memiliki dua variasi makna.

1. bermakna lingkungan planet bumi yang sudah jadi dengan konotasi tanah sebagai ruang tempat organisme atau jasad renik, wilayah tempat kehidupan manusia dan fenomena geologis.
2. bermakna lingkungan planet bumi dalam proses menjadi yakni proses penciptaan dan kejadian planet bumi. Untuk kepentingan perumusan konsep lingkungan tampaknya konotasi yang pertama yakni lingkungan bumi yang sudah jadi dapat membantu memperjelas dan mempertegas konsep.

Sedangkan untuk kata al-ard' dalam konotasi proses penciptaan lingkungan lebih tepat jika digunakan untuk kepentingan kajian filosofis. Oleh karena itu, yang perlu di cermati lebih lanjut adalah kata al-ard' yang berkonotasi bumi sebagai lingkungan yang sudah jadi.

Adapun penyebaran ayat ekologis yang menggunakan kata al-ard' dengan berbagai konotasinya dalam al-Qur'an adalah sebagai berikut:

Berkonotasi lingkungan hidup, Q.S. al-Baqarah/2: 22;

الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً  
فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ ۖ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ



Artinya: *(Dialah) yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap, dan Dialah menurunkan air (hujan) dari langit,*

*lalu dia menghasilkan dengan (hujan) itu buah-buahan sebagai rezki untukmu, Karena itu janganlah kamu mengadakan pertandingan-tandingan bagi Allah, padahal kamu mengetahui.*<sup>28</sup>

Berdasarkan data makna semantik kata al-ard' yang terungkap dalam al-Qur'an, maka terdapat indikasi kuat bahwa kata al-ard' dalam al-Qur'an dijadikan sebagai salah satu term guna memperkenalkan istilah lingkungan. Dalam hal ini, kata al-ard' digunakan dalam konotasi ekosistem, niche ekologis, lingkungan hidup dan habitat. Keseluruhan konotasi tersebut mengacu pada term lingkungan dalam ekologi. Dengan demikian, cakupan kuat untuk menyatakan bahwa salah satu konsep lingkungan dalam al-Qur'an diungkapkan dengan menggunakan term al-ard'.

Hal ini paralel dengan tradisi masyarakat ekologis yang lazim menggunakan istilah lingkungan untuk arti planet bumi. Dengan kata lain, masyarakat ekologi lazim memahami istilah lingkungan sebagai ungkapan lain dari istilah planet bumi. Berdasarkan kejumbuhan ini dapat dipertegas bahwa al-Qur'an tidak berseberangan dengan tradisi ekologi dalam menggunakan term bumi sebagai term lain lingkungan. Bahkan al-Qur'an lebih rinci dalam mendayagunakan term bumi untuk term lingkungan.

#### **4. Lingkungan Sebagai Ruang Kehidupan (*al-bi'ah*)**

Kata yang digunakan oleh al-Qur'an untuk memperkenalkan istilah lingkungan sebagai ruang kehidupan adalah kata al-bi'ah merupakan derivasi

---

<sup>28</sup> Departemen Agama RI, *Al-quran dan terjemahannya*.

dari kata ba'a, yabi'u, bi'atan, yang berarti kembali, menempati wilayah, ruang kehidupan dan lingkungan.<sup>29</sup>

Secara faktual, yang digunakan oleh al-Qur'an adalah kata derivan al-bi'ah itu sendiri. Entoh demikian tidak mengurangi komitmen al-Qur'an pada lingkungan, sebab makna substansial yang terkandung dalam ayat-ayat terkait cukup mendukungnya. Secara kuantitatif, kata ba'a dan derivasinya digunakan dalam al-Qur'an sebanyak 18 kali tersebar dalam 15 ayat.

Sedangkan secara kualitatif, derevisi kata al-bi'ah dalam al-Qur'an tidak selalu berkonotasi lingkungan sebagai ruang kehidupan, tetapi juga berkonotasi pada arti lain yakni:

Berkonotasi lagi atau berulang kali seperti Q.S. al-Baqarah/2: 61;

وَإِذْ قُلْتُمْ يَمُوسَىٰ لَنْ نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنْبِئُ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصِلَهَا ۖ قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ  
الَّذِي هُوَ أَذْيُ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ أَهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُمْ مَّا سَأَلْتُمْ ۖ  
وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ  
كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيَّيْنَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ۚ ذَٰلِكَ بِمَا عَصَوْا  
وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ﴿٦١﴾

<sup>29</sup> Mujiono Abdillah, *op. cit.*, h. 47.

Artinya; dan (ingatlah), ketika kamu berkata: "Hai Musa, Kami tidak bisa sabar (tahan) dengan satu macam makanan saja. sebab itu mohonkanlah untuk Kami kepada Tuhanmu, agar Dia mengeluarkan bagi Kami dari apa yang ditumbuhkan bumi, Yaitu sayur-mayurnya, ketimunnya, bawang putihnya, kacang adasnya, dan bawang merahnya". Musa berkata: "Maukah kamu mengambil yang rendah sebagai pengganti yang lebih baik ? Pergilah kamu ke suatu kota, pasti kamu memperoleh apa yang kamu minta". lalu ditimpahkanlah kepada mereka nista dan kehinaan, serta mereka mendapat kemurkaan dari Allah. hal itu (terjadi) karena mereka selalu mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh Para Nabi yang memang tidak dibenarkan. demikian itu (terjadi) karena mereka selalu berbuat durhaka dan melampaui batas.<sup>30</sup>

Dengann demikian, ketika al-Qur'an memperkenalkan lingkungan dengan term ruang kehidupan, al-bi'ah dapat dikatakan bahwa walaupun secara faktual al-Qur'an hadir jauh sebelum teori ekologi modern muncul, namun rumusan pengungkapan term lingkungan dengan menggunakan istilah ruang kehidupan, al-bi'ah, ternyata memiliki pijakan mapan selaras dengan teori ekologi modern.<sup>31</sup>

Bertitik tolak dari uraian tentang term yang digunakan oleh al-Qur'an untuk memperkenalkan konsep lingkungan dengan term seluruh spesies, al-'alamiin jagad raya, al-samaa', ruang tempat atau bumi, al-ard', dan lingkungan sebagai ruang kehidupan, al-bi'ah, dapat dikatakan bahwa konsep lingkungan hidup menurut al-Qur'an adalah lingkungan dalam arti luas yakni meliputi lingkungan alam planet bumi, ruang angkasa dan angkasa luar.

---

<sup>30</sup> Departemen Agama RI, *Al-quran dan terjemahannya*,

<sup>31</sup> Mujiono Abdillah, *op. cit.*, h. 50.

Lingkungan dipahami bukan hanya meliputi lingkungan hidup manusia melainkan lingkungan hidup spesies baik yang ada di ruang angkasa luar. Sebab pada kenyataannya, dengan ekosistem di luar ruang bumi. Oleh karena itu, menurut ajaran agama Islam manusia wajib menjaga kelestarian daya dukung lingkungan bukan saja dalam lingkungan planet bumi, melainkan juga di angkasa luar serta di luar angkasa.<sup>32</sup>

Dengan demikian, visi Islam tentang lingkungan adalah visi lingkungan yang utuh menyeluruh, holistik integralistik. Visi lingkungan yang holistik integral diproyeksikan mampu menjadi garda depan dalam pengembangan kesadaran lingkungan guna melestarikan keseimbangan ekosistem. Sebab seluruh komponen dalam ekosistem diperhatikan kepentingannya secara proporsional tidak ada yang dipentingkan dan tidak ada pula yang ditelantarkan oleh visi lingkungan Islam yang holistik integralistik.<sup>33</sup>

## **B. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandar Lampung**

### **1. Pengertian Ruang, Tata Ruang, dan Penataan Ruang**

Hukum tata ruang (*ruimtelijke ordening*; spasial law) merupakan cabang ilmu hukum yang relatif baru. Hukum tata ruang umumnya dimasukkan sebagai bagian hukum administrasi, karena sebagian besar

---

<sup>32</sup> *Ibid.*

<sup>33</sup> *Ibid.*, h. 51.



substansinya mengatur kebijakan penataan ruang mulai dari perencanaan ruang, pemanfaatan ruang, sampai pada pengendalian pemanfaatan ruang. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. A.V. Van Den Berg bahkan mengklarifikasikan hukum tata ruang sebagai bagian hukum lingkungan.<sup>34</sup>

Sebagaimana cabang ilmu hukum lainnya, belum ada pengertian yang baku hukum tata ruang. Secara sederhana Van Driel dan Van Vliet memberikan pengertian hukum tata ruang sebagai hukum yang mengatur penataan ruang (*ruimte*) yang terdiri dari sudut sosial, ekonomi, dan budaya menciptakan syarat-syarat yang paling menguntungkan bagi pengembangan hidup masyarakat di wilayah tersebut.<sup>35</sup>

Sementara Drupsteen mengartikan hukum tata ruang yaitu hukum yang berhubungan dengan kebijakan tata ruang, diarahkan kepada tercapainya atau terpeliharanya penyesuaian timbal balik yang terbaik anatar ruang dan kehidupan masyarakat.

Menurut Undang-undang nomor 26 tahun 2007 “ bahwa ruang itu adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara. Termasuk ruang didalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat

---

<sup>34</sup> Siti Sundari Rangkuti, *hukum lingkungan dan kebijaksanaan lingkungan nasional*, universitas airlangga press, 1996, hlm. 3

<sup>35</sup> Koesnadi hardjasoemantri, *Hukum tata lingkungan*, gadjah mada university press, 2000, hlm.

manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.<sup>36</sup>

Sedangkan pengertian tata ruang menurut Perda nomor 10 tahun 2007 adalah wujud struktur ruang dan pola ruang. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional.<sup>37</sup> Sedangkan penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.<sup>38</sup>

## **2. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)**

Rencana umum tata ruang merupakan perangkat penataan ruang wilayah yang disusun berdasarkan pendekatan wilayah administratif yang secara hierarki terdiri atas RTRW nasional, RTRW provinsi, dan RTRW kabupaten/kota. Rencana umum tata ruang nasional adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah nasional yang disusun guna menjaga integritas nasional, keseimbangan dan keserasian perkembangan antar wilayah dan antar sektor, serta keharmonisan antar lingkungan alam dengan lingkungan buatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Rencana umum tata ruang provinsi adalah rencana kebijakan operasional dari RTRW Nasional yang berisi strategi pengembangan wilayah provinsi, melalui optimasi pemanfaatan sumber daya, sinkronisasi

---

<sup>36</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang

<sup>37</sup> Ibid, pasal 1 angka 2 dan 3

<sup>38</sup> Ibid, pasal 1 angka 5

pengembangan sektor, koordinasi lintas wilayah kabupaten/kota dan sektor, serta pembagian peran dan fungsi kabupaten/kota di dalam pengembangan wilayah secara keseluruhan.

Rencana umum tata ruang kabupaten/kota adalah penjabaran RTRW provinsi kedalam kebijakan dan strategi pengembangan wilayah kabupaten/kota yang sesuai dengan fungsi dan peranannya di dalam rencana pengembangan wilayah provinsi secara keseluruhan, strategi pengembangan wilayah ini selanjutnya dituangkan ke dalam rencana struktur dan rencana pola ruang operasional.

Dalam operasionalisasinya rencana umum tata ruang dijabarkan dalam rencana rinci Tata Ruang yang disusun dengan pendekatan nilai strategis kawasan dan/atau kegiatan kawasan dengan muatan substansi yang dapat mencakup hingga penetapan blok dan subblok yang dilengkapi peraturan zonasi sebagai salah satu dasar dalam pengendalian pemanfaatan ruang sehingga pemanfaatan ruang dapat dilakukan sesuai dengan rencana umum tata ruang dan rencana rinci tata ruang. Rencana rinci tata ruang dapat berupa rencana tata ruang kawasan strategis dan rencana detail tata ruang.

Kawasan strategis adalah Kawasan yang penataan ruangnya diprioritaskan karena memiliki pengaruh penting terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia.

Rencana tata ruang kawasan strategis adalah upaya penjabaran rencana umum tata ruang ke dalam arahan pemanfaatan ruang yang lebih spesifik sesuai dengan aspek utama yang menjadi latar belakang pembentukan kawasan strategis tersebut. Tingkat kedalaman rencana tata ruang kawasan strategis sepenuhnya mengikuti luasan fisik serta kedudukannya di dalam sistem administrasi.

Rencana tata ruang kawasan strategis tidak mengulang hal-hal yang sudah diatur atau menjadi kewenangan dari rencana tata ruang yang berada pada jenjang di atasnya maupun dibawahnya. Rencana detail tata ruang merupakan penjabaran dari RTRW pada suatu kawasan terbatas, ke dalam rencana pengaturan pemanfaatan yang memiliki dimensi fisik mengikat dan bersifat operasional.

Rencana detail tata ruang berfungsi sebagai instrumen perwujudan ruang khususnya sebagai acuan dalam pemberian advise planning dalam pengaturan bangunan setempat dan rencana tata bangunan dan lingkungan.

Menurut Daud Silalahi, yang mengemukakan bahwa rencana tata ruang wilayah merupakan suatu pengertian yang secara eksplisit tersirat cakupan yang luas mengandung arti bahwa :

- 1) Seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah air dari seluruh rakyat Indonesia yang bersatu sebagai bangsa Indonesia.

- 2) Seluruh bumi, air dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa merupakan kekayaan nasional
- 3) Hubungan antara bangsa Indonesia dan bumi, air serta ruang angkasa termasuk bagian hubungan yang bersifat abadi.
- 4) Dalam pengertian bumi, selain permukaan bumi termasuk pula tubuh bumi dibawahnya serta yang berada dibawah air.
- 5) Dalam pengertian air termasuk baik perairan pedalaman maupun laut wilayah Indonesia.
- 6) Yang dimaksud dengan ruang angkasa ialah ruang di atas bumi dan air adalah yang berada didalam bumi.

Keenam point tersebut di atas secara tersirat mengandung pemaknaan terhadap ruang suatu wilayah yang perlu ditata khususnya yang berkaitan dengan bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan yang terdapat dalam suatu wilayah.<sup>39</sup>

Solihin memberikan pengertian rencana tata ruang wilayah adalah Mengatur, mengelolah, menangani, mempotensikan segala hal yang ada di atas bumi, air dan ruang angkasa untuk digunakan bagi kesejahteraan manusia yang

---

<sup>39</sup> Daud silalahi, *hukum lingkungan, dalam sistem penegakan hukum lingkungan di Indonesia*, alumni, 2001, hlm. 82

tinggal dalam ruang tersebut untuk memenuhi kepentingannya sesuai dengan kaidah-kaidah hukum yang mengatur penggunaan ruang.<sup>40</sup>

Dalam Peraturan Daerah kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah berdasarkan konsideran, memberikan pengertian bahwa:

Rencana tata ruang wilayah adalah suatu tindakan dalam mengelola dan menata suatu ruangan berdasarkan pemanfaatan pengelolaan sumber daya alam yang beraneka ragam di dataran, di lautan dan di udara, yang perlu dilakukan secara terkoordinasi dan terpadu dalam pola pembangunan berkelanjutan dengan mengembangkan tata ruang.

Dalam satu kesatuan tata lingkungan yang dinamis serta tetap terpeliharanya kelestarian kemampuan lingkungan hidup sesuai dengan pembangunan berwawasan lingkungan, yang menjadikan rencana tata ruang wilayah menjadi penting dan utama, sehingga diberikan adanya pengertian yang dapat dibedakan menurut peraturan daerah pengertian ruang, tata ruang, rencana tata ruang wilayah, rencana tata ruang dan wilayah.

Penjelasan uraian tersebut di atas maka dapat dibedakan pengertian yang memberikan keutuhan atas pengertian rencana tata ruang wilayah yang dikemukakan oleh Sadli Samad yaitu sebagai berikut:

---

<sup>40</sup> Solihin, *pengaturan hukum rencana tata ruang wilayah dan interior perkotaan*, gramedia pustaka, 2004, hlm. 18

- 1) Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan dan makhluk lainnya hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya
- 2) Tata ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang baik direncanakan maupun tidak
- 3) Rencana tata ruang wilayah adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang,
- 4) Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang dan,
- 5) Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya ruang batas dan sistem ditentukan berdasarkan aspek administrasi dan atau aspek fungsional .

Uraian tersebut di atas memperlihatkan bahwa pernyataan ruang dalam tinjauan hukum dapat mencerminkan adanya pengertian yang kompleks untuk melakukan suatu kegiatan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian rencana tata ruang wilayah yang sesuai dengan ketentuan dalam pengelolaan tata ruang wilayah.<sup>41</sup>

Atas uraian dan tinjauan yang dikemukakan di atas, maka dapat diambil suatu kesimpulan bahwa rencana tata ruang wilayah diartikan sebagai bentukperumusan kebijakan pokok dalam memanfaatkan ruang dalam suatu wilayah yang mewujudkan keterpaduan, keterkaitan dan keseimbangan perkembangan antara wilayah serta keserasian antara sektor dalam

---

<sup>41</sup> Sadli samad, *hukum rencana tata ruang wilayah*, gramedia pustaka, 2003, hlm. 42



mengeksikasikan pentingnya rencana tata ruang wilayah yang diterapkan di Kota Bandar lampung.

#### 1. Tugas dan Wewenang RT/RW Penyelenggaraan Penataan Ruang

Berkaitan dengan wewenang pemerintah, menurut H.D. Stout, yang dimaksud dengan wewenang adalah pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan, yang dapat di jelaskan sebagai seluruh aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang-wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik didalam hukum publik. Wewenang Pemerintah dalam penyelenggaraan penataan ruang meliputi :

- a) Pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota, serta terhadap pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis nasional, provinsi, dan kabupaten/kota;
- b) Pelaksanaan penataan ruang wilayah nasional;
- c) Pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis nasional; dan
- d) Kerja sama penataan ruang antarnegara dan pemfasilitasan kerja sama penataan ruang antarprovinsi.

Wewenang pemerintah daerah provinsi dalam penyelenggaraan penataan ruang meliputi :

- a) Pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah provinsi, dan kabupaten/kota, serta terhadap pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis provinsi dan kabupaten/kota;

- b) Pelaksanaan penataan ruang wilayah provinsi;
- c) Pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis provinsi dan kabupaten/kota;
- d) Kerjasama penataan ruang antar provinsi dan pemfasilitasan kerja antar kabupaten/kota.

Wewenang pemerintah daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan penataan ruang meliputi :

- a) Pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota dan kawasan strategis kabupaten/kota;
- b) Pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota;
- c) Pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis kabupaten/kota; dan
- d) Kerjasama penataan ruang antar kabupaten/kota.

## 2. Asas dan Tujuan Penataan Ruang

Menurut Herman Hermit “sebagaimana asas hukum yang paling utama yaitu keadilan, maka arah dan kerangka pemikiran serta pendekatan-pendekatan dalam pengaturan (substansi peraturan perundang-undangan), termasuk Undang-undang penataan Ruang, wajib dijiwai oleh asas keadilan”.<sup>42</sup>

Berdasarkan Perda Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2011 ditegaskan bahwa penataan ruang diselenggarakan berdasarkan asas :

---

<sup>42</sup> Herman Hermit, pembahasan Undang-undang Penataan Ruang, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 68

### 1) Keterpaduan

Yang dimaksud dengan “keterpaduan” adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mengintegrasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan, antara lain, adalah pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.

### 2) Keserasian, keselarasan, dan keseimbangan

Yang dimaksud dengan “keserasian, keselarasan, dan keseimbangan” adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mewujudkan keserasian antara struktur ruang dan pola ruang, keselarasan antara kehidupan manusia dengan lingkungannya, keseimbangan pertumbuhan dan perkembangan antardaerah serta antara kawasan perkotaan dan pedesaan.

### 3) Keberlanjutan

Yang dimaksud dengan “keberlanjutan” adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan menjamin kelestarian dan kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan dengan memperhatikan kepentingan generasi mendatang.

### 4) Keberdayagunaan dan Keberhasilgunaan

Yang dimaksud dengan “keberdayagunaan dan keberhasilgunaan” adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mengoptimalkan manfaat ruang dan sumber daya yang terkandung di dalamnya serta menjamin terwujudnya tata ruang yang berkualitas.

#### 5) Keterbukaan

Yang dimaksud dengan “keterbukaan” adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan penataan ruang.

#### 6) Kebersamaan dan kemitraan

Yang dimaksud “kebersamaan dan kemitraan” adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

#### 7) Perlindungan kepentingan umum

Yang di maksud dengan “perlindungan kepentingan umum” adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mengutamakan kepentingan masyarakat.

#### 8) Kepastian hukum dan keadilan

Yang dimaksud dengan “kepastian hukum dan keadilan” adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan berlandaskan hukum/ketentuan peraturan perundang-undangan dan bahwa penataan ruang dilaksanakan dengan mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat serta melindungi hak dan kewajiban semua pihak secara adil dengan jaminan kepastian hukum.

### 9) Akuntabilitas

Yang dimaksud dengan “akuntabilitas” adalah bahwa penyelenggaraan penataan ruang dapat di pertanggungjawabkan, baik prosesnya, pembiayaan, maupun hasilnya.

Adapun penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman,nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional dengan :

- a. Terwujudnya antara lingkungan alam dan lingkungan buatan;
- b. Terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia; dan
- c. Terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negative terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.

### C. Pengertian Penegakan Hukum Lingkungan

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.<sup>43</sup>

Penegakan hukum lingkungan merupakan mata rantai terakhir dari siklus pengaturan (*regulatory chain*) perencanaan kebijakan lingkungan. Kegiatan melaksanakan dan menegakkan peraturan tidak hanya menjadi tanggung jawab

---

<sup>43</sup> Jimly asshiddiqie, *pembangunan hukum dan penegakan hukum di Indonesia*, seminar menyoal moral penegak hukum, gadjah mada, febuari 2006

pengadilan, melainkan yang paling utama menjad tanggung jawab Aparatur pemerintah di bidang lingkungan hidup.

Untuk itu tepatlah pandangan Keith Hawkins, bahwa penegakan hukum lingkungan dapat dilihat dari dua sistem atau strategi yang disebut “*compliance*” dengan dengan “*conciliatory style*” sebagai karakteristiknya dan “*sanctioning*” dengan “*penal style*” sebagai karakteristiknya.

Block, sebagaimana dikutip oleh Hawkins menyatakan, bahwa *conciliatory style* itu “*remedial*”, suatu metode “*social repair and maintenance, assistance of people in trouble*”, berkaitan dengan “*what is necessary to ameliorate a bad situation*”, sedangkan penal control “*prohibits with punishment*”, sifatnya adalah “*accusatory*”, hasilnya “*binary*”, yaitu “*all or nothing punishment*”.<sup>44</sup>

Pendapat Hawkins tersebut di ikuti oleh Daud Silalahi yang menyatakan bahwa penegakan hukum di Indonesia mencakup penataan dan penindakan yang mencakup bidang hukum administrasi Negara, bidang hukum perdata, dan bidang hukum pidana.<sup>45</sup> Pandangan yang sama dikemukakan Siti Sundari Rangkuti, bahwa penegakan hukum lingkungan merupakan upaya mencapai ketaatan terhadap peraturan dan persyaratan dalam ketentuan hukum yang berlaku secara umum dan individual, melalui pengawasan dan penerapan (atau ancaman) sarana administratif, pidana, dan Perdata.

---

<sup>44</sup> Muhammad Akib, *Hukum Lingkungan Perspektif global dan Nasional*, PT Raja Grafindo Persada, 2014, hlm. 204

<sup>45</sup> Daud Silalahi, “*Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia Melalui Pendekatan Kesadaran hukum dan Lingkungan*”, Orasi Ilmiah, Dies natalis XXXIV Universitas Padjajaran, 1991, hlm. 1



### **BAB III HASIL PENELITIAN**

#### **1. Keadaan umum Kelurahan Gedong Meneng**

##### **1. Sejarah Singkat Kelurahan Gedong Meneng**

Kelurahan Gedong Meneng merupakan Kelurahan induk di Kecamatan Rajabasa, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2001 Tanggal 03 Oktober 2001 tentang penggabungan, Penghapusan dan Pemekaran Wilayah Kecamatan dan Kelurahan dalam Wilayah Kota Bandar Lampung. Semula kelurahan dalam wilayah Kota Bandar Lampung Berjumlah 84 Kelurahan dari 9 Kecamatan, dan sejak Tanggal 29 Desember 2001 Kota Bandar Lampung menjadi 98 Kelurahan dari 13 Kecamatan, dan Kelurahan Gedong Meneng awalnya merupakan bagian dari Kecamatan Kedaton dan sejak tanggal tersebut masuk dalam Kecamatan Rajabasa.<sup>46</sup>

Tujuan dari pemekaran Kecamatan Kedaton adalah dalam rangka peningkatan kegiatan penyelenggaraan Pemerintah secara berdaya guna dan berhasil guna serta merupakan sarana bagi pembinaan wilayah dan unsur pendorong yang kuat bagi usaha peningkatan laju pembangunan, juga sebagai sarana memperpendek rentang kendali pelayanan kepada masyarakat. Dengan ditetapkannya dan disahkannya Peraturan Daerah No 04 Tahun 2001 tanggal 03 Oktober, tentang Pemekaran Daerah wilayah

---

<sup>46</sup> *Dokumentasi, Kelurahan Gedong Meneng*



kecamatan dan Kelurahan dalam wilayah Kota Bandar Lampung maka Kelurahan Gedung Meneng termasuk didalam Kecamatan Rajabasa.

## 2. Gambaran Umum Kelurahan Gedung Meneng

Untuk menunjang pelaksanaan Pemerintahan Kelurahan Gedung Meneng Kecamatan Rajabasa didukung Pegawai yang berjumlah 9 orang dengan susunan Personil seperti pada table berikut ini :

**Tabel 1.** Susunan Personil Kelurahan Gedung Meneng.

NO	NAMA	NIP	JABATAN
1	Zkiri Bakar S.H.	19610618 198101 1 001	Lurah
2	Lukman, S.Sos.	460018645	Sekretaris
3	Rosyana, S.Sos	19651004 198603 2 008	Kasi Pemerintahan
4	Efendi Husin	19580304 197903 1 005	Kasi Trantib
5	Titin Apriantini,SE	19740421 200221 2 205	Kasi Pembangunan
6	Megawati BR. SH	196706 061992 2 012	Kasi Penmas
7	Samsir Pohan	19590628 198603 1 004	Staf
8	Mukhdar	19601201 197903 1 001	Staf
9	Tri Hastuti	19641008 198603 2 012	Staf

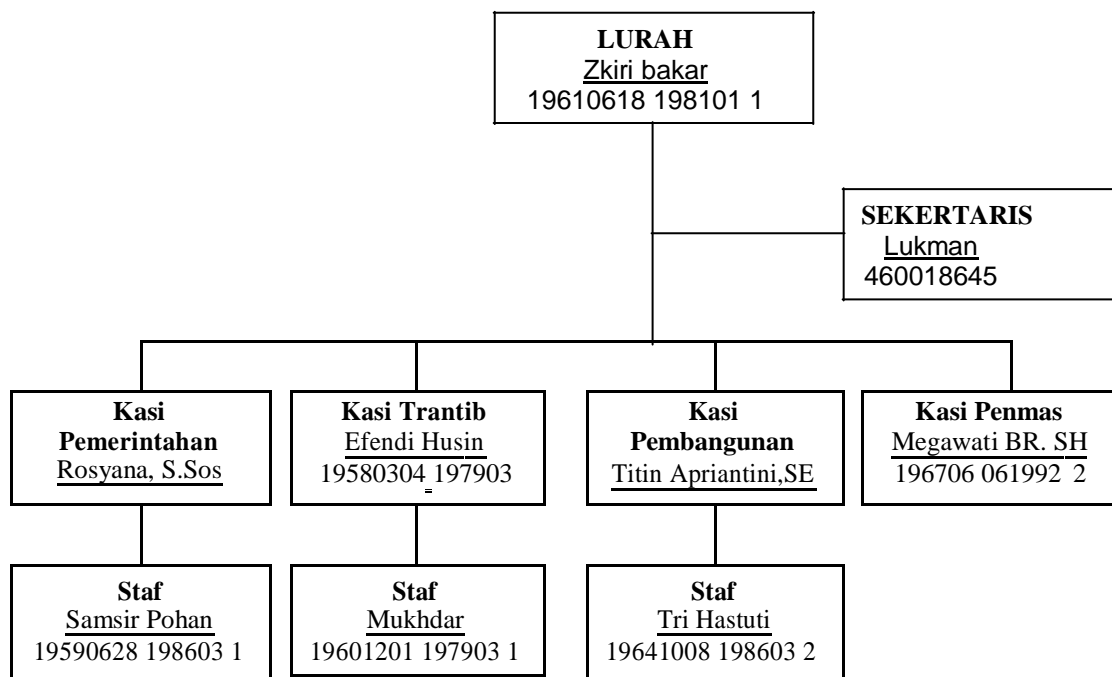
( Sumber : Monografi Kelurahan Gedung Meneng April 2018)<sup>47</sup>

Bagan struktur organisasi kelurahan Gedung meneng dapat dilihat pada gambar berikut ini.

---

<sup>47</sup> *Dokumentasi, Kelurahan Gedong Meneng*

**STRUKTUR ORGANISASI KELURAHAN GEDUNG MENENG**  
**KECAMATAN RAJABASA KOTA BANDAR LAMPUNG**  
**BERDASARKAN KEP. WALI KOTA BANDAR LAMPUNG NO 37**  
**TAHUN 2018**



**Gambar 4. 1.** Bagan Struktur Organisasi Kelurahan Gedung Meneng

(Sumber : Monografi Kelurahan Gedung Meneng April 2018 )<sup>48</sup>

Kelurahan Gedung Meneng dibagi menjadi 2 (dua) Lingkungan dan 15 (delapan belas) Rukun Tetangga (RT) seperti pada table berikut ini :

<sup>48</sup> Dokumentasi, Kelurahan Gedong Meneng

**Tabel 2.** Daftar Nama Kepala lingkungan ( LK ) dan Rukun Tetangga ( RT ) Kelurahan Gedung Meneng

NO	LINGKUNGAN I	LINGKUNGAN II
	<b>Maktub Zais ( K. Lk.I )</b>	<b>Suherman ( K. Lk. II )</b>
1	Juandi ( RT 01 )	M. yusuf ( RT 01 )
2	Usri yusup ( RT 02 )	Istamar ( RT 02 )
3	Johansyah ( RT 03 )	Bestori ( RT 03 )
4	Anshari ( RT 04 )	Ansori ( RT 04 )
5	Herijaldi ( RT 05 )	Hanafi ( RT 05 )
6	Edi junaidi ( RT 06 )	Nasrudin ( RT 06 )
7	Khamdani ( RT 07 )	Gunadi (RT 07)
8		Subarmo (RT 08)

( Sumber : Monografi Kelurahan Gedung Meneng April 2018 )<sup>49</sup>

### 3.Keadaan Demografis

Penduduk Gedung Meneng terdiri dari berbagai suku bangsa (heterogen). Sampai dengan tahun 2009, berdasarkan data statistik kelurahan Gedung Meneng berpenduduk berjumlah **12.885** jiwa. Penyebaran penduduk di Kelurahan Gedung Meneng secara umum merata

---

<sup>49</sup> Dokumentasi, Kelurahan Gedong Meneng

disemua tempat dan sebagian lainnya penduduk yang tidak tetap, dikarenakan banyaknya rumah kos (*Rumah Sewaan*) dikelurahan Gedung Meneng sebagai dampak positif dalam pertumbuhan Ekonomi dan sebagai Faktor Negatif bagi masalah kamtibmas, dikarenakan dalam wilayah kelurahan Gedung Meneng yang merupakan domisili perguruan tinggi dalam kata lain Gedung Meneng merupakan sentral Pendidikan.<sup>50</sup>

Berikut ini gambar peta sebaran penduduk Kelurahan Gedung Meneng :

**Gambar 4. 2.** Peta Kelurahan Gedung Meneng



( Sumber : Monografi Kelurahan Gedung Meneng April 2018)<sup>51</sup>

<sup>50</sup> Wawancara dengan zkiri Bakar, Lurah Gedong Meneng

<sup>51</sup> *Dokumentasi*, Kelurahan Gedong Meneng

#### 4. Sosial Ekonomi

Sebagian besar penduduk Gedung Meneng bermata pencarian pedagang, dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk lebih jelas lihat table berikut:

**Tabel 3.** Jumlah Penduduk berdasarkan mata pencarian

No	Mata Pencarian	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	1264	1494	2758
2	TNI	27	-	27
3	Pedagang	480	358	833
4	Petani	34	14	48
5	Pertukangan	59	-	59
6	Buruh	53	41	94
7	Pensiunan	1325	1114	2439
8	Lain-lain	3116	3511	6627
<b>Jumlah</b>		<b>6147</b>	<b>6738</b>	<b>12.885</b>

( Sumber : Monografi Kelurahan Gedung Meneng April 2018 )<sup>52</sup>

#### 5. Sosial Budaya

Penduduk Kelurahan Gedung Meneng bersifat Heterogen, Karena hampir sebagian besar adalah masyarakat Pendatang yang memiliki latar belakang agama, suku dan budaya, dan tingkat pendidikan yang beragam. Sebagian besar penduduk Kelurahan Gedung Meneng memeluk agama Islam.

---

<sup>52</sup> Dokumentasi, Kelurahan Gedong Meneng

Adapun komposisi jumlah penduduk pada tahun 2018 berdasarkan agama dapat dilihat pada table berikut :

**Tabel 4.** Komposisi jumlah penduduk berdasarkan Agama

No.	Agama	Jumlah
1	Islam	11.440
2	Kristen	427
3	Katholik	804
4	Hindu	206
5	Budha	8
<b>Jumlah</b>		<b>12.885</b>

( Sumber : Monografi Kelurahan Gedung Meneng April 2018 )<sup>53</sup>

## 6. Sarana Ibadah

Tempat Peribadatan dikelurahan Gedung Meneng sesuai dengan agama yang dipeluk oleh Masyarakat dengan kondisi kerukunan antar umat bergama sangat baik. Jumlah tempat ibadah yang ada dikelurahan Gedung Masyarakat dapat dilihat pada table berikut ini :

---

<sup>53</sup> *Dokumentasi*, Kelurahan Gedong Meneng

**Tabel 5.** Sarana Tempat Peribadatan

No	Tempat Ibadah	Jumlah
1	Masjid	14
2	Musholla	3
3	Gereja	-
<b>Jumlah</b>		<b>17</b>

( Sumber : Monografi Kelurahan Gedung Meneng April 2018 )<sup>54</sup>

## 7. Tingkat Pendidikan

Adapun Komposisi Penduduk menurut tingkat pendidikan dapat dilihat pada table berikut ini :

**Tabel 6.** Tingkat Pendidikan Masyarakat

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Sarjana	1343
2	Sarjana	1471
3	SMU/SLTA	5664
4	SMP/SLTP	1864
5	Sekolah Dasar	1708
5	Taman Kanak-kanak	278
6	Pra Sekolah	558
<b>Jumlah</b>		<b>12.885</b>

( Sumber : Monografi Kelurahan Gedung Meneng April 2018 )

---

<sup>54</sup> Dokumentasi, Kelurahan Gedong Meneng



## 8. Sarana Pendidikan

Tempat pendidikan merupakan sarana yang sangat mendukung untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat. Jumlah sarana pendidikan dikelurahan Gedung Meneng dapat dilihat pada table berikut ini :

**Tabel 7.** Sarana Pendidikan

No	Jenis Pendidikan	Gedung Sekolah	Jumlah Guru	Jumlah Murid
1	Taman Kanak-kanak	3		
2	Sekolah Dasar	3		
3	SLTP/SMP	2		
4	SMU/SLTA	3		
5	Akademi	4		
6	Universitas	4		
<b>Jumlah</b>		<b>19</b>		

( Sumber : Monografi Kelurahan Gedung Meneng April 2018 )<sup>55</sup>

## 3. Potret Pembangunan Kelurahan Gedong Meneng

### 1. AGAMA (Sarana Peribadatan)

a. Jumlah Mesjid	:	14	Buah
b. Jumlah Mushala	:	3	Buah
c. Jumlah Gereja	:	—	Buah
d. Jumlah Wihara	:	—	Buah
e. Jumlah Pura	:	—	Buah

### 2. KESEHATAN

---

<sup>55</sup> *Dokumentasi, Kelurahan Gedong Meneng*

1. Rumah sakit umum Pemerintah	:	-	Buah
2. Rumah Sakit umum Swasta	:	2	Buah

### 3. PENDIDIKAN

#### 1. Pendidikan umum

a. kelompok bermain	:	1 Guru 2	Buah	20	Murid
b. TK	:	3 Guru 14	Buah	129	Murid
c. Sekolah dasar	:	2 Guru 14	Buah	300	Murid
d. SMTP	:	2 Guru 24	Buah	640	Murid
e. SMTA	:	2 Guru 42	Buah	1210	Murid
f. Universitas	:	4 Guru 510	Buah	22.000	Murid

#### 2. Pendidikan khusus

	:				
a. Pondok Pesantren	:	2 Guru 8	Buah	96	Murid
b. Madrasah	:	- Guru -	Buah	-	Murid
c. Sekolah Luar biasa	:	- Guru -	Buah	-	Murid
d. Sarana Pendidikan nonformal	:	- Guru -	Buah	-	Murid

### 4 .SARANA OLAH RAGA KESENIAN/KEBUDAYAAN

1. Sarana Olahraga	:	4	Jenis	2	Buah
2. Sarana Kesenian Kebudayaan	:	-	Jenis	-	Buah
3. Sarana Sosial	:	-	Jenis	-	Buah

### 5. PRASARANA HUBUNGAN

1. Jalan	:	-	Jenis
2. Jembatan	:	-	Jenis
3. Terminal	:	-	Jenis

## 6. KOMUNIKASI

a. Jumlah Jenis Sarana Komunikasi	:	-	Jenis
b. Jumlah Sarana Komunikasi	:	-	Jenis

## 7. ALAT TRANSPORTASI

a. Jumlah jenis sarana transportasi	:	7	Jenis
b. Jumlah Sarana Transportasi	:	281	Buah

## 8. INDUSTRI

a. Jumlah Jenis Sarana Transportasi	:	-	Jenis
b. Jumlah Sarana Transportasi	:	-	Buah

## 9. PARIWISATA

a. Jumlah Jenis Sarana Pariwisata	:	-	jenis
b. Jumlah Sarana Pariwisata	:	-	Buah

## 10. PENGAIRAN

a. Jumlah Jenis Sarana Pengairan	:	-	Jenis
b. Jumlah Sarana pengairan	:	-	Buah

## 11. PERTANIAN

a. Padi dan palawija	:	-	HA -	Ton
b. Sayur-sayuran	:	-	HA -	Ton
c. Buah-buahan	:	-	HA -	Ton

## 12. PERKEBUNAN

1. Jenis Usaha Perkebunan	:	1	Jenis
2. Jumlah Luas Perkebunan	:	1,5	Jenis
3. Jumlah Hasil Usaha Perkebunan	:	3,5	Jenis

### 13. PERTAMANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

Jumlah Luas dan Banyaknya

- |                             |     |    |   |      |
|-----------------------------|-----|----|---|------|
| 1. Taman                    | : - | HA | - | Buah |
| 2. Jumlah Sarana kebersihan | : - | HA | - | Ton  |

### 14. PERIKANAN

- |                                 |           |       |
|---------------------------------|-----------|-------|
| 1. Jumlah Jenis Usaha Perikanan | : 1       | Jenis |
| 2. Jumlah Luas Usaha Perikanan  | : 9,5     | HA    |
| 3. Jumlah Hasil usaha Perikanan | : 50.0000 | Ekor  |

### 15. PERTENAKAN

- |                                  |       |       |
|----------------------------------|-------|-------|
| 1. Jumlah Jenis Usaha peternakan | : 4   | Jenis |
| 2. Jumlah Binatang Ternak        | : 807 | Ekor  |

## 4. Implementasi Perda Kota No 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2011-2030 di Kelurahan Gedong Meneng

implementasi Perda Kota Bandar Lampung No 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2011-2030 Dikelurahan Gedong Meneng menunjukan Perkembangan sedikit demi sedikit mengalami kemajuan. Misalnya dalam hal pendataan pembangunan, pemanfaatan lahan dan Pelestarian lingkungan Hidup.<sup>56</sup>

Sebelum adanya Perda Kota Bandar Lampung No 10 Tahun 2011 Aparat dan Masyarakat kurang memperdulikan pemanfaatan Ruang dan Pelestarian

---

<sup>56</sup> Wawancara dengan Ansyari, RT 04 Gedong Meneng

lingkungan yang akan berdampak kedepannya seperti Tumpang Tindih dan banjir, setelah Penerapan Perda Kota Bandar Lampung No 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2011-2030 meski belum sepenuhnya diterapkan tapi telah menunjukkan kemajuan dalam Lelestarian Lingkungan. Namun ada beberapa hal yang yang harus segera di selesaikan oleh Lurah dan RT 04 diantaranya:<sup>57</sup>

#### 1. Sosialisasi

Sosialisasi tentang Rencan Tata Ruang Wilayah sangat diperlukan sehingga fungsi lahan dapat diterapkan dengan baik dan benar oleh masyarakat. Sosialisasi tentang fungsi lahan tiap RT sangat dibutuhkan oleh masyarakat karena tidak semua masyarakat menegtahui tentang fungsi lahan.

Upaya tersebut akan memberikan pengaruh terhadap optimalnya peraturan daerah terkait tentang masalah alih fungsi lahan. Untuk itu, sosialisasi tentang fungsi lahan harus lebih dioptimalkan agar lahan hijau di Kelurahan Gedong meneng tidak mengalami alih fungsi yang mengakibatkan hilangnya lahan Hijau”.<sup>58</sup>

#### 2. Pengawasan

Dalam mengoptimalisasikan implementasi Perda No 10 Tahun 2011 tentang Rencana tata ruang wilayah 2011-2030, maka diperlukan pengawasan terhadap optimalnya peraturan tersebut. Pengawasan tentang perubahan fungsi

---

<sup>57</sup> Wawancara dengan K. Pandu Herlambang, Tokoh Masyarakat

<sup>58</sup> Wawancara dengan Khairussaleh., Tokoh Agama

lahan harus dilakukan oleh Aparat yang berwenang. Pengawasan tersebut antara lain pengawasan terhadap izin perubahan lahan.<sup>59</sup>

Apabila, terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan Perda Rencana Tata Ruang wilayah, maka pemerintah Tidak memberikan Ijin mendirikan Bangunan. Sehingga dengan adanya pengawasan, maka baik masyarakat maupun para pengembang bisnis Kosan dan perumahan akan berhati-hati dalam melakukan alih fungsi lahan.<sup>60</sup>

### 3. Penegakan hukum

Penegakan Hukum dengan cara mengenakan sangsi memberikan peluang bagi pemerintah untuk tetap melindungi Kelestarian Lingkungan. Pemengenaan sangsi dalam pemanfaatan ruang sangat berguna dalam mengatasi masalah alih fungsi lahan. karena apabila kawasan yang dibatasi pengembangannya tersebut dimanfaatkan oleh masyarakat atau pun pihak pengembang bisnis perumahan dan kost-kostan maka akan berdapak buruk bagi Lingkungan. Penegakan dalam Penerapan Peraturan.<sup>61</sup>

#### a. Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Rencana Tata Ruang

Faktor penghambat pertama; Partisipasi masyarakat masih rendah, hal ini disebabkan tidak tersampainya informasi tentang Perda Kota Bandar Lampung No 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2011-

---

<sup>59</sup> Wawancara dengan Herlina Fitriani, Masyarakat

<sup>60</sup> Wawancara dengan Santi, Masyarakat

<sup>61</sup> Wawancara dengan Khairussaleh., Tokoh Agama

2030 dan kurangnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi penetapan pemanfaatan ruang.

Berdasarkan hasil penelitian ini masyarakat masih belum faham tentang fungsi Tata Ruang, belum optimalnya komunikasi antara pihak yang melakukan komunikasi dengan masyarakat sehingga kurang pengetahuan masyarakat tentang Tata Ruang itu, dan menurut masyarakat belum dilibatkan dalam Raperda sehingga aspirasi masyarakat belum menjadi sebuah pertimbangan dalam implementasi kebijakan.<sup>62</sup>

b. Faktor-Faktor Pendukung Implementasi Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah :

Faktor pendukung, adanya peningkatan infrastruktur sesuai dengan aspirasi masyarakat dan perencanaan tata ruang wilayah, meningkatkan jumlah bangunan, penduduk dan pendidikan, yang menunjang peningkatan ekonomi dan pengetahuan masyarakat. Pembangunan ekonomi dan kawasan pendidikan kadang tidak memperhatikan hal yang merupakan sumber pendukung yang lainnya, berupa antisipasi terhadap masalah sosial dan lingkungan.<sup>63</sup>

---

<sup>62</sup> Wawancara dengan Sri Apriyani, Masyarakat

<sup>63</sup> Wawancara dengan M. Yusup, Masyarakat

## **BAB IV ANALISIS**

### **A. Implementasi Perda Kota Bandar Lampung Nomor 10 tahun 2011 tentang Rencana Tata ruang wilayah tahun 2011-2030 di Kelurahan Gedong Meneng Kec. Rajabasa**

Berdasarkan hasil penelitian, Implementasi Perda Kota Bandar Lampung Nomor 10 tahun 2011 tentang Rencana Tata ruang wilayah tahun 2011-2030 Sangat lah berpengaruh dalam pelestarian lingkungan dan menangani permasalahan alih pungsi lahan yang tidak sesuai. Aparat pemerintahan Kelurahan Gedong Meneng Telah ada upaya dalam menjalankan peraturan daerah kota bandar Lampung seperti: membagikan serapan Air di setiap rumah, penanaman pohon dan mengadakan agenda rutin gotong royong tiap minggu. Walau belum sepenuhnya memenuhi amanah yang tertera dalam Pasal 10 Perda Kota Bandar Lampung Nomor 10 tahun 2011 tentang Rencana Tata ruang wilayah tahun 2011-2030 menjelaskan strategi pelestarian Lingkungan seperti yang tercantum di ayat 6 huruf D:

- a. mengembangkan hutan lindung, taman kota, jalur hijau jalan dan RTH;
- b. menata bukit dan gunung sebagai area konservasi baru;
- c. menciptakan area konservasi alternatif di bantaran sungai dan area lain yang memiliki kualitas lingkungan yang rendah; dan
- d. melestarikan Lingkungan dan mengembangkan keanekaragaman hayati



Terhambatnya Implementasi Perda Kota Bandar Lampung Nomor 10 tahun 2011 tentang Rencana Tata ruang wilayah tahun 2011-2030 yang berkenaan tentang pelestarian lingkungan pada Kelurahan gedong Meneng yaitu:

1. Di dalam bidang partisipasi masyarakat terdapat masalah yakni tingkat pengetahuan tentang Pelestarian Lingkungan. Kemudian masih rendahnya rasa kepedulian terhadap Lingkungan sekitar.
2. Masalah di bidang pengawasan dalam Masyarakat terutama pembangunan pada Kelurahan Gedong Meneng, yakni terbatasnya Pengetahuan tentang Penataan Ruang, lalu terdapat juga pelaku-pelaku yang menyalahi aturan yang telah di tetapkan seperti pelaku pengembang bisnis kosan dan perumahan. Maka pengawasan dala penerapan Perda Kota Bandar Lampung Nomor 10 tahun 2011 tentang Rencana Tata ruang wilayah tahun 2011-2030 sangat di perlukan dalam mewujudkan kelestarian Lingkungan.
3. Permasalahan di Penegakan Hukum yang terdapat Keluraha Gedong Meneng adalah tidak adanya tindakan tegas terhadap pelanggaran-pelanggaran yang tidak sesuai dengan Perda Kota Bandar Lampung.

Meskipun demikian, Kelurahan Gedong Meneng termasuk lingkungan pendidikan seperti yang tertera dalam Pasal 15 Ayat 5 Hurup A Perda Kota Bandar Lampung Nomor 10 tahun 2011 tentang Rencana Tata ruang wilayah tahun 2011-

2030 menjelaskan tentang: Jl. Zainal Abidin Pagar Alam, Gedong Meneng, kawasan pendidikan. Berikut beberapa keunggulan;

1. Meningkatnya impratraktur
2. Meningkatnya pembangunan
3. Meningkatnya Pertumbuhan Penduduk
4. Meningkatnya Pertumbuhan Pendidikan
5. Pembangunan ekonomi

**B. Pandangan Hukum Islam Terhadap Implementasi Perda Kota Bandar Lampung Nomor 10 tahu 2011 tentang Tata ruang wilayah tahun 2011-2030 di Kelurahan Gedong Meneng Kec. Rajabasa**

Penataan Ruang di Kelurahan merupakan hal penting dalam Pelestarian Lingkungan untuk Mengatur masalah penataan Ruang yang bertujuan untuk menjaga dan Melestarikan Lingkungan suatu daerah, RT dan Aparat kelurahan sebagai penyelenggara Penataan Ruang untuk kepentingan Masyarakat setempat kedepannya. Kelurahan berwenang mengenakan Sangsi dan mengawasi pembangunan yang tidak sesuai guna terwujudnya Kelestarian Lingkungan. Semua yang diamanahkan Perda Kota Bandar Lampung Nomor 10 tahun 2011 tentang Rencana Tata ruang wilayah tahun 2011-2030.

Islam mempunyai prinsip-prinsip dalam hal pembangunan/penataan kota yang menjadi *guidance* dalam membuat kebijakan penataan sebuah kota atau ruang. Contoh, Rosulallah SAW telah Mengajarkan dan menuntun

manusia untuk dapat menata tempat tinggalnya dalam rangka kemaslahatan untuk esok dan generasi mendatang.

Perda Kota Bandar Lampung Nomor 10 tahun 2011 tentang Rencana Tata ruang wilayah tahun 2011-2030. Menurut perspektif hukum Islam sudah sesuai dengan syariat Islam sebagaimana telah di jelaskan di landasan teori menata dan melestarikan lingkungan hukumnya wajib Yang bertujuan kemaslahatan untuk esok dan generasi mendatang. dan di jelaskan pula Sebagai mana konsep penataan ruang ruang islam yang mementikan:

1. Seluruh Spesies (Al-amin)
2. Jagat Raya (Al-samma)
3. Ruang, tempat atau Bumi ( Al-ard)
4. Lingkungan (Al-bi'ah)

Impelementasi Perda Kota Bandar Lampung Nomor 10 tahun 2011 tentang Rencana Tata ruang wilayah tahun 2011-2030 sudah berjalan tetapi masih terdapat permasalahan seperti:

- a) Di dalam bidang partisipasi masyarakat terdapat masalah yakni tingkat pengetahuan tentang Pelestarian Lingkungan. Kemudian masih rendahnya rasa kepedulian terhadap Lingkungan sekitar.
- b) Masalah di bidang pengawasan dalam Masyarakat terutama pembangunan pada Kelurahan Gedong Meneng. yakni terbatasnya Pengetahuan tentang Penataan Ruang, lalu terdapat juga pelaku-pelaku yang menyalahi aturan yang telah di tetapkan seperti pelaku

pengembang bisnis kosan dan perumahan. Maka pengawasan dalam penerapan Perda Kota Bandar Lampung Nomor 10 tahun 2011 tentang Rencana Tata ruang wilayah tahun 2011-2030 sangat diperlukan dalam mewujudkan kelestarian Lingkungan.

- c) Permasalahan di Penegakan Hukum yang terdapat Kelurahan Gedong Meneng adalah tidak adanya tindakan tegas terhadap pelanggaran-pelanggaran yang tidak sesuai dengan Perda Kota Bandar Lampung.

Hal ini seringkali tercermin dalam beberapa pelaksanaan ibadah, seperti ketika menunaikan ibadah haji. Dalam haji, umat Islam dilarang menebang pohon-pohon dan membunuh binatang. Lebih dari itu Allah swt. melarang manusia berbuat kerusakan di muka bumi. Sebagai mana yang telah dijelaskan Q.S. al-A'rāf/7: 85 Manusia sebagai makhluk Allah swt. yang mulia diperintahkan untuk selalu berbuat baik dan dilarang untuk berbuat kerusakan di atas bumi.

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan diatas maka yang dapat di simpulkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Implementasi Perda Kota Bandar Lampung No 10 tahun 2011 tentang rencana tata ruang wilayah 2011-2030 Kota Bandar Lampung belum sepenuhnya dilakukan oleh Kelurahan Gedong Meneng Kecamatan Rajabasa dimana masih banyak hal-hal yang perlu dibenahi.
2. Pandangan hukum islam terhadap Implementasi Perda Kota Bandar Lampung Nomor 10 tahun 2011 tentang Rencana Tata ruang wilayah tahun 2011-2030 di Kelurahan Gedong meneng sudah berjalan namun masih ada permasalahan yang harus di benahi/di selesaikan

### **B. Rekomendasi**

Berdasarkan kesimpulan diatas maka penulis menyarankan beberapa hal yakni :

1. Perlu ada kerjasama terpadu antar pemerintah, masyarakat dalam pemanfaatan fungsi tata ruang demi keserasian, keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup.
2. Perlu ada partisipasi masyarakat dalam menjaga dan mengawasi pemanfaatan tata ruang demi kelestarian lingkungan, dan Perlu ada ketegas dari pemerintah dalam menindak Masyarakat yang melakukan alih pungsi lahan yang tidak sesuai dengan peraturan sebagaimana telah di tetapkan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Baiquni. *Al-Qur'an Ilmu Pengetahuan dan Teknologi* Cet. 1; Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1994.
- Cholid Narbuto. *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- Daud Efendy. *Manusia Lingkungan dan Pembangunan*. Jakarta Lembaga Penelitian UIN SYAHID 2008.
- Daud Silalahi, “*Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia Melalui Pendekatan Kesadaran hokum dan Lingkungan*”, Orasi Ilmiah, Dies natalis XXXIV Universitas Padjajaran, 1991.
- Daud Silalahi. *Hukum Lingkungan, dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia*, Alumni, 2001.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Edisi III, Jakarta: Balai Pustaka, 2001.,
- Dyayadi. *Tata Kota Menurut Islam*. Jakarta; Pustataka AL-Kautsar Grup, 2008, cet. Ke-1
- Elta Mamang Sangaji. *Metode Penelitian Pendekatan Praktik dalam Penelitian*. Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2010.
- Herman Hermit. *Pembahasan Undang-undang Penataan Ruang*. Bandung: Mandar Maju, 2008.
- Iqbal Hasan. *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.
- Jimly Asshiddiqie. *Pembangunan Hukum Dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, seminar menyoal moral penegakhukum, gadjahmada, febuari 2006
- Juliansyah. *Metode Penelitian*. Jakarta: Kencana, 2010
- Koesnadi Hardjasoemantri. *Hukum tatalingkungan*. Yogyakarta: Gadjah Mada UniversityPress, 2000.
- M. Daud Silalahi. *Hukum Lingkungan, dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*. Alumni Bandung, 2001.
- MT. Dyayadi. “*Tata Kota Menurut Islam*”cet. Ke-1. Jakarta: Pustataka AL-Kautsar Grup, 2008.
- Muhammad Akib. *Hukum Lingkungan Perspektif global dan Nasional*. PT Raja Grafindo Persada, 2014.
- Muhammad Akib, Charles Jackson, AgusTriono, MarliaEka P. *Hukum Penataan Ruang*. Bandar Lampung: PKKPUU FH UNILA, 2013.
- Mujiono Abdillah. *Agama Ramah Lingkungan Perspektif Al-Qur'an Cet I*. Jakarta: Paramadina, 2001.
- Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang

- Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang
- Perda Kota Bandar Lampung No. 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2011-2030
- SadliSamad. *Hukum Rencana Tata Ruang Wilayah*. Yogyakarta: Gramedia Pustaka, 2003.
- Said Aqil Husin AL-Munawar. *Hukum Islam dan Pluralitas social*. Jakarta: Penamadi, 2005.
- Slamet Riyadi. *Ekologi Ilmu Lingkungan Dasar-dasar dan Pengertiannya*. Surabaya: Usaha Nasional, 1998.
- Soerjino Soekanto. *Pengantar Penelitian*. Jakarta :Universitas Indonesia Press, 1986.
- Solihin. *Pengaturan Hukum Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Interior Perkotaan*. Yogyakarta: Gramedia Pustaka, 2004.
- Susiadi AS. *Metodologi Penelitian*. Bandar Lampung: 2015.
- Sutrisno Hadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rieneka Cipta, 2006.

#### **Sumber lain**

- Darmawati, Choirul Saleh, Imam Hanapi, *Implementasi Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Dalam Prespektif Pembangunan Berkelanjutan*, Jurnal Sosial dan Ilmu Politik. ISSN. 2442-6962 Vol. 4, No. 2 (2015).
- Kharismaway, "Ayat Tentang Perintah Menjaga Kelestarian Lingkung." Blog Kharismaway, <http://kharismaway.blogspot.com/2012/06/telah-nampak-kerusakan-didaratdan-di.html>. (30 September 2013)
- Muttaqin Choiri, *Posisi Ra'y Dalam Pembentukan Hukum Islam*, Al-adalah Vol. XII, 4. Desember 2015, hlm.744